

**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Ternate menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2014 sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2014

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada dasarnya LKPD Kota Ternate TA 2014 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan menegenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate selama TA 2014 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Ternate serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Ternate dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota ternate berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama TA 2014.

**1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44368);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
12. Peraturan WaliKota Ternate Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 42);
13. Peraturan WaliKota Ternate Nomor 41 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 41);

### **1.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **1.3.1. Unsur Laporan Keuangan**

LKPD Kota Ternate TA 2014 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintahan

Kota Ternate, yang terdiri dari PPKD (BUD) dan SKPD. LKPD Kota Ternate TA 2014 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).  
LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).
2. Neraca  
Data mengenai Kas Umum Daerah, Investasi Daerah, Dana Cadangan, Tuntutan Perbendaharaan, Piutang Dana Perimbangan, Aset Tetap, Utang Bunga, Utang Luar Negeri (jangka pendek dan jangka panjang), dan Pendapatan Diterima Dimuka didasarkan pada Neraca PPKD (BUD), sedangkan data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Tuntutan Ganti Rugi, Persediaan , Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, dan Utang Pemotongan Pajak didasarkan pada Neraca SKPD konsolidasi.
3. Laporan Arus Kas (LAK)  
Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama TA 2014.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan mengenai kondisi umum Pemerintah Kota Ternate, penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

#### 1.3.2. Entitas

Untuk TA 2014, entitas dalam Pemerintah Kota Ternate yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate meliputi:

1. Dinas Pendidikan Nasional
2. Sanggar Kegiatan Belajar
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Pemadam Kebakaran
6. Dinas Tata Kota dan Pertamanan
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
8. Dinas Perhubungan dan Kominfo
9. Dinas Kebersihan Pertamanan
10. Badan Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Kantor Pemberdayaan Perempuan
13. Badan Pengendalian Kependudukan dan KB Daerah
14. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
15. Dinas Koperasi dan UKM
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

17. Dinas Pemuda dan Olahraga
18. Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja
19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
20. DPRD
21. WaliKota dan Wakil WaliKota
22. Sekertariat Daerah
23. Sekertariat DPRD
24. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25. Inspektorat
26. Kecamatan Ternate Utara
27. Kecamatan Ternate Selatan
28. Kecamatan Pulau Ternate
29. Kecamatan Pulau Moti
30. Kecamatan Ternate Tengah
31. Kecamatan Batang Dua
32. Kecamatan Pulau Hiri
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34. Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate
35. Bdan Pemberdayaan Masyarakat
36. Badan Kepegawaian Daerah
37. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
38. Dinas Pertanian dan Kehutanan
39. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
40. Dinas Kelautan dan Perikanan
41. Dinas Pasar
42. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

LKPD Kota Ternate TA 2014 mencakup transaksi teungan yang berasal dari APBD dan pelaksanaan APBD pada seluruh SKPD dan PPKD (BUD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

LKPD ini tidak mencakup entitas :

1. Pemerintah Pusat, dan
2. Badan Usaha Milik daerah (BUMD)

#### **1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate disajikan dengan urutan sebagai berikut:

##### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

##### Bab II Ekonomi Makro

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian target Kinerja APBD

##### Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan

- 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
  - 4.1. Entitas Pelaporan
  - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan laporan Keuangan
  - 4.3. Kebijakan Akuntansi
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1. Pendapatan
  - 5.2. Belanja
  - 5.3. Surplus/Defisit
  - 5.4. Pembiayaan
  - 5.5. Aset
  - 5.6. Kewajiban
  - 5.7. Ekuitas Dana
  - 5.8. komponen-komponen Arus Kas
- Bab VI Penutup

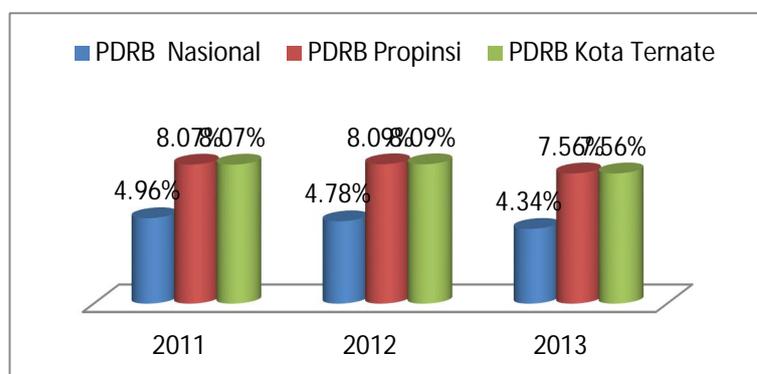
## BAB II EKONOMI MAKRO

### 2.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Ternate Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

#### 1. Relatif terjaganya stabilitas ekonomi dengan baik

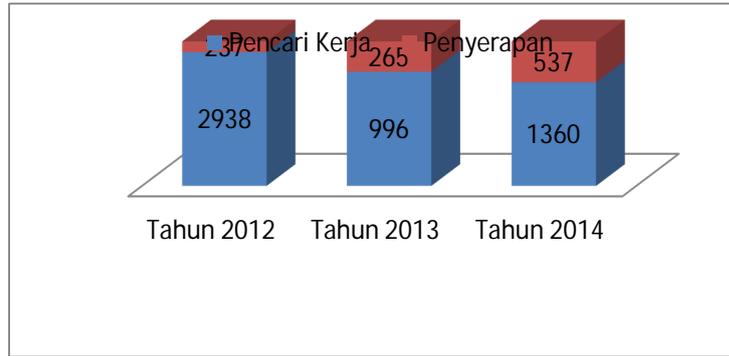
Tercermin dari semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate yang dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ternate berdasarkan harga konstan dalam 3 tahun terakhir (2011-2013)



Berdasarkan grafik perkembangan PDRB Kota Ternate diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 (Angka sangat sementara), PDRB Kota Ternate mengalami kenaikan dan berada diatas PDRB Nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan sedikit lebih baik dibandingkan dengan laju pertumbuhan nasional.

#### 2. Kemampuan ekonomi untuk memperluas`lapangan kerja

Sebagai Kota yang memiliki karakteristik perdagangan dan kegiatan jasa, maka penanganan permasalahan ketenagakerjaan menjadi sangat penting. Pada Tahun 2014 banyaknya pencari kerja terdaftar di Kota Ternate adalah sebanyak 1.360 orang, pada tahun 2013 sebanyak 996 orang, dan pada tahun 2012 sebanyak 2.938 orang. Sedangkan penyerapan tanga kerja pada tahun 2014 adalah sebanyak 537 orang , tahun 2013 tenaga kerja yang diserap adalah sebanyak 265 orang dan tahun 2012 sebanyak 237 Orang (data dari Dinas tenaga kerja dan sosial Kota ternate)



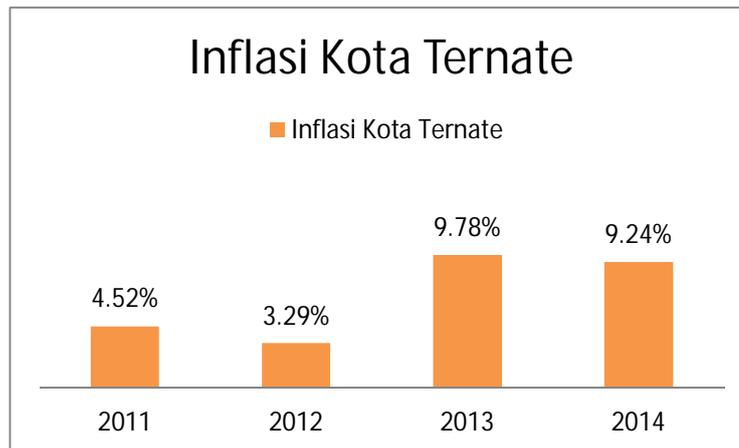
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate.

Dengan melihat perkembangan yang ada, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan ekonomi dalam kurun waktu 2012-2014 diperkirakan telah mampu meningkatkan banyaknya lowongan kerja yang dapat diisi oleh tenaga kerja, dan menurunnya jumlah pencari kerja dari tahun 2012 sampai Tahun 2014.

### 3. Tingkat Perubahan Harga(Inflasi)

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan agregat makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga, dan distribusi pendapatan.

Inflasi dapat tercermin dari fluktuasi pergerakan Indeks harga Konsumen (IHK) yang dalam konteks regional terutama dipengaruhi oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan factor musiman (hari raya, dan tahun baru). Berikut disajikan data perkembangan inflasi dari tahun 2011 sampai 2014.

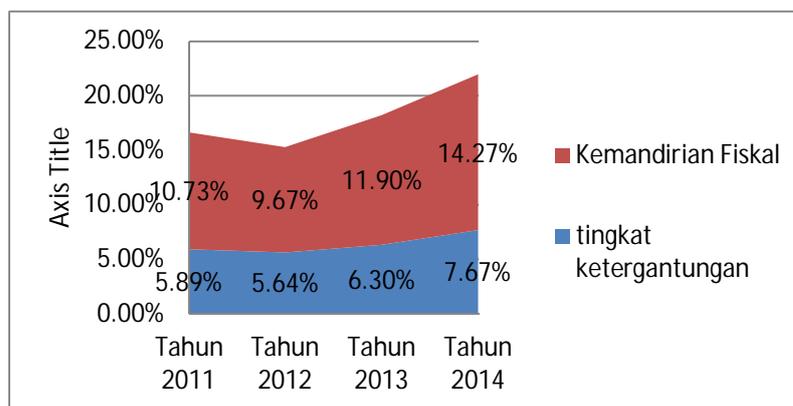


Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa inflasi di Kota Ternate dalam kurun waktu 2011 – 2014 relatif meningkat.

### 4. Kemandirian ekonomi daerah

Kemandirian ekonomi daerah Kota Ternate relatif masih belum begitu kuat, yang dicerminkan oleh relatif belum meningkatnya kemampuan fiskal daerah dari tahun ke tahun. Kemampuan fiskal daerah ini dapat dilihat dari (1) rasio ketergantungan daerah-pusat yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah (minimal

20%) dan (2) tingkat kemampuan daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Tidak Langsung (minimal 100%). Berdasarkan grafik terlihat bahwa tingkat ketergantungan Kota Ternate terhadap Pemerintah Pusat diantara tahun 2011 – 2014 secara rata-rata masih di bawah 10% dan tingkat kemandirian keuangan daerah sejak tahun 2011 – 2014 masih dibawah 100% yaitu rata-rata masih dibawah 11%.



## 2. 2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keungan daerah tidak saja ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat , namun juga diperlukan untuk menungkatkan target pendapatan dan mengefektifkan belanja serta efisiensi pembiayaan.

### 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan dalam bidang Pendapatan Daerah pada TA 2014 diarahkan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan melalui upaya stabilisasi dan/atau peningkatan Dana Transfer, dan dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Daerah antara lain :

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. OPT.imalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan lain-lain PAD yang sah berdasarkan aturan perUndang-Undangan yang berlaku;
- b. Peningkatan koordinasi dan pelibatan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pengelolaan Pandapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran dan capaiannya berdasarkan indikator dan tolak ukur yang digunakan ;
- c. Peningkatan efesiensi, efektifitas, profesionalitas, dan proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD );

- d. Peningkatan kapasitas , kompetensi , kreatifitas dan inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru melalui kerja sama dan kemitraan (*partnership*) dengan berbagai pihak yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (*openess*) dan keadilan (*fairness*) serta tidak memberatkan masyarakat;
- f. Pengkajian dan penyempurnaan berbagai peraturan perundangan dalam rangka percepatan dan pelancaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan yang bersifat *reviewing* terhadap peraturan perundangan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh teknologi informasi;

## **2. Dana Perimbangan**

- a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak atau Dana Bagi Hasil Bukan Pajak , Dana ALokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal;
- b. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber dana bagi hasil seperti pemungutan PBB, PPh 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
- c. Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen dan variabel dalam penghitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Laokasi Khusus (DAK) seperti : data jumlah penduduk ( terutama jumlah penduduk miskin ), jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kelemahan kontruksi , Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- d. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Kota Ternate , dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya peningkatan dana perimbangan.

## **3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- a. Pendekatan dengan Pihak Provinsi dan upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. Peningkatan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara , Maluku dan Sulawesi Utara dalam upaya peningkatan kerjasama pembangunan regional ( upaya pengembangan kerja sama wilayah ) .

### **2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan Belanja Daerah merupakan kebijakan yang mengatur kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kebijakan belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan kedalam bentuk peningkatan pelayanan dasar , pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan failitas umum layak pakai serta pengembangan jaminan sosial. Kebijakan belanja daerah secara lebih khusus terdiri dari belanja tidak langsung

dan belanja langsung yang mengalami peningkatan sebesar 13,97% diantaranya adalah :

1. Pada kebijakan belanja tidak langsung ( dari pos tambahan penghasilan guru dan pos tunjangan profesi guru PNSD )
2. Peningkatan belanja langsung sampai dengan 11,51 % dengan sasaran pada kepentingan publik sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek rasionalitas dan proporsionalitas pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

### 2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah mengatur semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Semua penerimaan yang dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA yang bersangkutan maupun pada TA berikutnya . Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

### 2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA APBD KOTA TERNATE

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah , sehingga Pemerintah Kota Ternate memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam TA 2014. Penetapan capaian kinerja fiskal TA 2014 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) TA 2014 dan yang kedua adalah melalui Perda Nomor 13 Tahun 2014 Perubahan APBD TA 2014.

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Perubahan	
			Rp	%
I.Pendapatan	733.265.109.000,00	754.743.993.000,00	21.478.884.000	2,93
I.1. Pendapatan Asli Daerah	50.015.000.000,00	54.493.884.000,00	4.478.884.000	8,96
I.2 Pendapatan Transfer	682.990.109.000,00	699.990.109.000,00	17.000.000.000	0,64
I.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	
II. Belanja	755.930.386.806,00	784.914.846.000,00	28.984.459.194	3,83
II.1 Belanja Tidak Langsung	406.021.478.297,00	421.277.318.551,00	15.255.840.254	3,76
II.2 Belanja Langsung	349.908.908.509,00	363.637.527.449,00	13.728.618.940	3,92
Surplus/Defisit	(22.665.277.806,00)	(30.170.853.000,00)	(7.505.575.194)	33,11
III.Pembiayaan	22.665.277.806,00	30.170.853.000,00	7.505.575.194,00	33,11
III.1 Penerimaan	28.665.277.806,00	36.520.853.000,00	7.855.575.194	27,40
III.2 Pengeluaran	6.000.000.000,00	6.350.000.000,00	350.000.000	5,83
SiLPA Tahun Berjalan	0	0	0	

**BAB III**  
**IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL**  
**PEMERINTAH KOTA TERNATE**

**1.1. IKTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL**

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada TA 2014 anggaran Belanja Daerah Kota Ternate ditetapkan sebesar Rp784.914.846.000,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp54.493.884.000,00, Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp699.990.109.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp260.000.000,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp30.170.853.000,00 yang direncanakan ditutup melalui pinjaman daerah.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Ternate selama tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

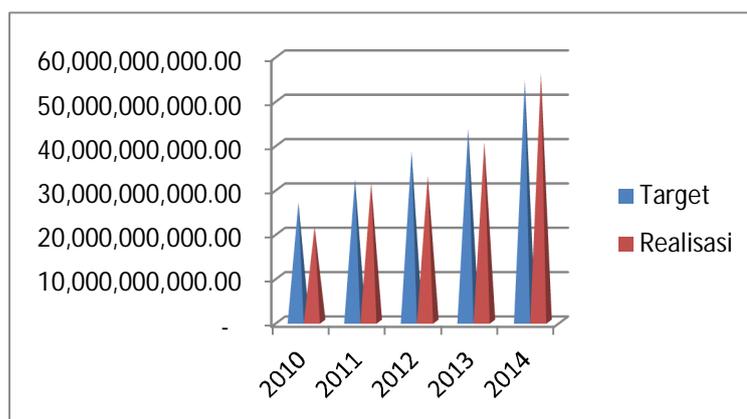
Tabel 2. Iktisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Ternate TA 2014

Uraian	Target	Realisasi 2014	Selisih	
			Rp	%
I. Pendapatan	754.743.993.000,00	772.962.110.479,94	18.218.117.479,94	102,41
I.1. Pendapatan Asli Daerah	54.493.884.000,00	57.765.211.341,94	3.271.327.341,94	106,00
I.2. Pendapatan Transfer	699.990.109.000,00	715.145.849.038,00	15.155.740.038,00	102,17
I.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	260.000.000,00	51.050.100,00	(208.949.900,00)	19,63
II. Belanja	784.914.846.000,00	730.910.518.287,24	(54.004.327.712,76)	93,12
II.1. Belanja Operasi	612.703.287.461,00	572.045.507.400,00	(40.657.780.061,00)	93,36
II.2. Belanja Modal	162.211.558.539,00	149.178.430.887,24	(13.033.127.651,76)	91,97
II.3. Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	9.686.580.000,00	(313.420.000,00)	96,87
Surplus / Defisit	(30.170.853.000,00)	42.051.592.192,70	72.222.445.192,70	(139,38)
III. Pembiayaan				
III. Penerimaan	36.520.853.000,00	(17.900.126.387,00)	(54.420.979.387,00)	(49,01)
III. Pengeluaran	6.350.000.000,00	5.750.000.000,00	(600.000.000,00)	90,55
SILPA Tahun Berjalan	-	18.401.465.805,70	18.401.465.805,70	

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp772.962.110.479,94 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp754.743.993.000, atau 102,41%. Adapun untuk dapat melihat perkembangan kemandirian daerah dapat terlihat dari penerimaan PAD

Tabel 3. Perkembangan PAD dari Tahun 2010 s.d Tahun 2014

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2010	26.905.000.000,00	21.442.993.424,00
2	2011	32.200.000.000,00	31.318.111.818,00
3	2012	38.435.000.000,00	32.907.344.834,00
4	2013	43.535.000.000,00	40.572.363.457,00
5	2014	54.493.884.000,00	57.488.803.335,13



Secara keseluruhan dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 baik target maupun realisasi PAD Kota Ternate mengalami kenaikan.

Dilihat dari sisi target anggaran, dari TA 2013 sampai dengan tahun 2014 target PAD mengalami kenaikan Rp10.958.884.000,00.

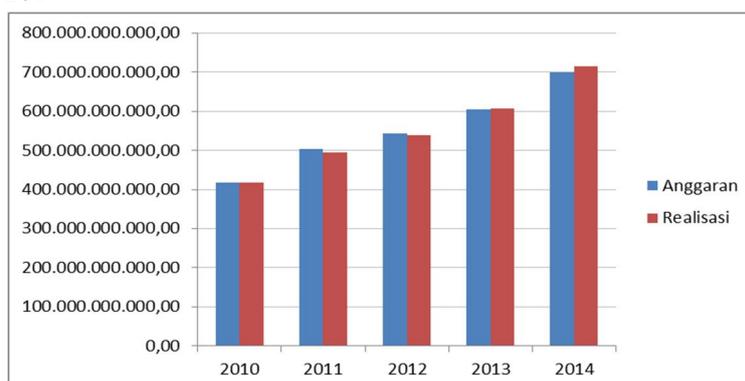
Apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp17.192.847.884,94 atau 42,38%.

Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rp715.145.849.038,00 (102,17%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp699.990.109.000,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dari tahun 2013 sampai dengan 2014 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 4 dan Grafik 6 berikut ini :

Tabel 4. Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan tahun 2010 s/d 2014.

No	Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi
1.	2010	417.790.455.800,00	417.075.237.962,00
2.	2011	504.149.031.800,00	493.702.871.653,00
3.	2012	543.343.142.000,00	538.753.884.271,00
4.	2013	604.418.367.000,00	606.008.253.543,00
5.	2014	699.990.109.000,00	715.145.849.038,00

Grafik 6. Perkembangan Target dan Realisasi PendaPT.an Transfer Th 2010 – 2014



Apabila dibandingkan dengan TA 2013, terjadi peningkatan dari sisi realisasi pada TA 2014 sebesar Rp35.584.183.432,00.

Untuk pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah dari target penerimaan sebesar Rp260.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp51.050.100,00 atau 19,63%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Lain-Lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
3. Dana Bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/Kota;
4. Dana Penyesuaian dan Dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah. Pada TA 2014 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp784.914.846,000,00 dan direalisasikan sebesar Rp730.910.518.287,24 atau 93,12% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp54.004.327.713,76 atau 6,88%

Grafik 7. Perbandingan Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung



Belanja tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp421.277.318.551,00 yang direalisasikan sebesar Rp392.232.921.336,00 atau 93,10% Anggaran dan realisasi Belanja tidak Langsung ini terdiri dari :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2014

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	400.388.318.551,00	371.950.872.266,00	92,90
2	Belanja Bunga	-	-	0,00
3	Belanja Hibah	5.350.000.000,00	5.300.000.000,00	99,07
4	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	4.799.967.700,00	96,00
5	Belanja Bantuan Keuangan	538.500.000,00	498.370.270,00	92,55
6	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	9.686.580.000,00	96,87
Jumlah		421.276.818.551,00	392.235.790.236,00	93,11

Belanja langsung digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program. Pada TA 2014, belanja langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp363.616.677.449,00 dan terealisasi sebesar Rp338.677.596.951,24 atau 93,14% dengan perincian sebagai berikut :

#### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung 2014

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	58.726.150.200,00	55.690.660.639,00	94,83%
2.	Belanja Barang dan Jasa	142.678.968.710,00	133.808.505.425,00	93,78%
3.	Belanja Modal	162.211.558.539,00	149.178.430.887,24	91,97%
Jumlah		363.616.677.449,00	338.677.596.951,24	93,14%

Dalam hal Pembiayaan Daerah, sebagai pos untuk menutup defisit pemerintah daerah merencanakan untuk mencukupi dengan pinjaman daerah, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp36.520.853.000,00 direalisasikan sebesar 0% , atau tidak terjadi pinjaman daerah.

Rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.350.000.000,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.750.000.000,00.

Defisit anggaran yang ditargetkan di tahun 2014 sebesar Rp30.170.853.000,00 dalam realisasinya dapat ditekan dan tidak terjadi defisit dan terealisasi SiLPA sebesar Rp18.401.465.805,70.

### 3.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAIPAAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kinerja keuangan TA 2014, yaitu:

1. Obyek retribusi yang mengalami peningkatan;
2. Kapasitas yang tersedia tidak mengalami penambahan sehingga potensi obyek retribusi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal
3. Masih adanya kebutuhan yang terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber daya yang tersedia;
4. Adanya program-program lanjutan strategis , terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;
5. Banyak alternatif/ usulan program menurut bidang pembangunan yang perlu dilaksanakan;
6. Kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
7. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD telah berjalan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan situasi dan kondisi lingkungan Pemerintah Kota Ternate baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah :

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;

3. Peningkatan koordinasi antara Dinas/Kantor/Badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
5. Penyebarluasan informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. ENTITAS PELAPORAN**

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Ternate TA 2014 adalah Pemerintah Kota Ternate. Selain itu Pemerintah Kota Ternate memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

#### **4.2. BASIS AKUNTANSI**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate TA 2014 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

#### **4.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Ternate TA 2014 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran II dan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD Kota Ternate TA 2014 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota Ternate TA 2014 sesuai dengan Peraturan WaliKota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi adalah :

##### **1. Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Ternate dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Ternate. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

##### **2. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Ternate. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

##### **3. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,

yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari kas daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

#### 4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Ternate maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasi menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset lainnya.

##### a. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasi, dipakai, dimiliki dan untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusannya (SKPD, SPT.PD dan SKRD).

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Ternate, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan :

- ❖ Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- ❖ Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- ❖ Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

##### b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Ternate dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan

dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi Jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2014 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan deviden atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh penyertaan modal daerah pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Ternate maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dilaporkan berdasarkan pada harga perolehan.

Menurut Lampiran B.VII tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan WaliKota Nomor 41 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam LKPD Kota Ternate TA 2014, seluruh aset tetap yang dikelola oleh Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini sesuai dengan lampiran B.VII tersebut di atas, bahwa pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual.

Kapitalisasi aset tetap untuk TA 2014 mengacu kepada Lampiran B.VII tentang Akuntansi Aset tetap pada Peraturan WaliKota Nomor 41 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi, dimana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan
- Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap, misalnya biaya pemeliharaan, penggantian atau perbaikan
- Pengeluaran untuk pemeliharaan, penambahan, penggantian dan perbaikan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, batasan jumlah

biaya (*capitalization thresholds*) sebesar 5 % dari nilai harga perolehan tertentu sebagai penambah harga perolehan.

- Pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal dan pengeluaran pendapatan.
- Belanja modal merupakan pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
- Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Misalnya mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas Negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara /pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak berwujud meliputi *Software* Komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*); paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kota Ternate yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Ternate, dan piutang tidak tertagih (macet) juga termasuk dalam kelompok aset lain-lain.

## 5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Ternate. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan utang Jangka Pendek Lainnya.

### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saat ini Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Kota Ternate pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah Kota Ternate dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang

Pemerintah Kota Ternate dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah Kota Ternate merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terakhir.

Kebijakan akuntansi telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah Kota Ternate di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi Pemerintah Kota Ternate, sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. *Past service liability* berupa pensiun dan tunjangan hari tua (THT) diungkap dalam Catatan Penting lainnya pada LKPD ini.

c. Kewajiban Kontijensi

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah Kota Ternate, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

6. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Ternate, yaitu selisih antara aset dan utang Pemerintah Kota Ternate. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

7. Selisih Kurs

Menurut kebijakan Akuntansi, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi. Utang Pemerintah Kota Ternate dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadi transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Namun, LKPD Kota Ternate TA 2014 ini tidak menyajikan selisih kurs atau aset atau kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam neraca.

**BAB V**  
**PENJELASAN LAPORAN POS – POS KEUANGAN**

Bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat pada laporan keuangan, dimana pos Pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana tercatat dalam Neraca. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, suRplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam TA 2014.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate mengenai Aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2014, dan saldo kas serta setara kas pada tanggal 31 Desember 2014.

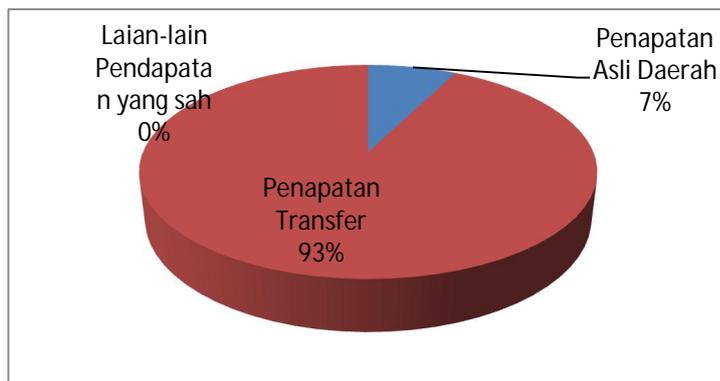
**5.1. PENDAPATAN**

Pada TA 2014 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp754.743.993.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 772.962.110.479,94 atau 102,41 % dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk TA 2014 yang telah diterima di kas Daerah terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran 2014 (Rp)	Realisasi 2014		Realisasi 2013 (Rp)
			Rp	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	54.493.884.000,00	57.765.211.341,94	105,50	40.572.363.457,00
2	Pendapatan Transfer	699.990.109.000,00	715.145.849.038,00	102,17	606.008.253.543,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	260.000.000,00	51.050.100,00	19,63	119.009.570,00
	Jumlah	754,743,993,000,00	772.962.110.479,94	102,41	646.699.626.570,00

Berdasarkan rincian pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer memiliki capaian realisasi diatas 100%. Pendapatan Asli Daerah melampaui target sebesar Rp3.271.327.341,94 Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapat Daerah pada TA 2013, maka realisasi TA 2014 lebih tinggi 42,38% atau Rp17.192.847.884,94

## Perbandingan Realisasi Pos-pos Pendapatan Daerah TA 2014



Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kota Ternate sudah dapat menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, dimana PAD dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

### 5.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah untuk TA 2014 yang telah diterima oleh kas daerah terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014	%	Realisasi 2013
1	Pajak Daerah	25.400.000.000,00	31.160.603.565,00	122,68	21.586.741.654,00
2	Retribusi Daerah	18.446.000.000,00	14.789.487.140,50	80,18	12.765.797.677,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan	500.000.000,00	765.132.728,00	153,03	365.392.583,00
4	Lain2 PAD yg sah	10.147.884.000,00	11.049.987.908,44	108,89	5.854.431.543,00
	Jumlah	54.493.884.000,00	57.765.211.341,94		40.572.363.457,00

Berdasarkan rincian PAD di atas terlihat bahwa ada tiga sumber yang melampaui target penerimaan yang telah ditentukan yaitu Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah, sedangkan satu sumber lainnya tidak dapat mencapai target yaitu Retribusi Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD TA 2013 maka terjadi peningkatan sebesar Rp17.192.847.884,94 atau 42,38%.

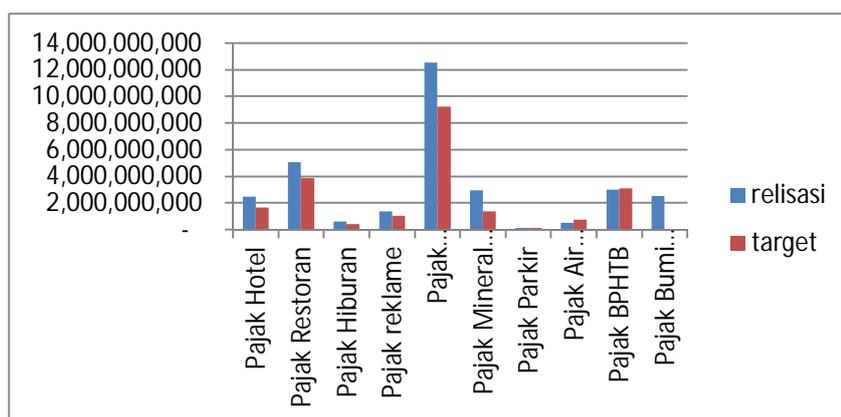
#### 5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2014 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	2.485.877.645,00	124,29	1.660.736.344,00
2	Pajak Restoran	3.850.000.000,00	5.043.419.820,00	131,00	3.858.617.958,00
3	Pajak Hiburan	550.000.000,00	628.290.555,00	114,23	426.470.411,00
4	Pajak reklame	1.125.000.000,00	1.394.439.560,00	123,95	1.060.478.086,00
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	9.475.000.000,00	12.512.225.569,00	132,06	9.214.406.467,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	2.500.000.000,00	2.932.744.970,00	117,31	1.381.787.900,00
7	Pajak Parkir	250.000.000,00	125.521.722,00	50,21	128.610.270,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	750.000.000,00	506.100.502,00	67,48	769.192.768,00
9	Pajak BPHTB	2.900.000.000,00	3.004.749.800,00	103,61	3.086.441.450,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	2.000.000.000,00	2.527.233.422,00	126,36	-
		25.400.000.000,00	31.160.603.565,00	122,68	21.586.741.654,00

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa ada dua pos Pajak yang tidak mencapai target penerimaan yang ditetapkan. Dari total penerimaan Pajak daerah ada pelampauan target sebesar Rp5.790.603.565,00 atau 22,68%.

**Grafik 9 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2013-TA 2014**



Berdasarkan grafik realisasi di atas terlihat bahwa, sebagian besar komponen Pajak Daerah pada TA 2014 memiliki realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada TA 2013.

#### 5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jumlah Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2014 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
<b>I.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>11.208.000.000,00</b>	<b>9.068.335.250,00</b>	80,91	<b>8.150.776.250,00</b>
1	Pelayanan Kesehatan	-	10.580.000,00	100,00	-
2	Pelayanan Kebersihan	2.250.000.000,00	1.643.165.000,00	73,03	1.701.341.000,00
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-	9.400.000,00	100,00	564.810.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.925.000.000,00	1.263.700.000,00	65,65	1.342.600.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	5.670.000.000,00	5.444.565.250,00	96,02	3.819.460.250,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	363.000.000,00	75.945.000,00	20,92	159.465.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000.000,00	620.980.000,00	62,10	563.100.000,00
<b>II.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>2.260.000.000,00</b>	<b>1.345.810.000,00</b>	59,55	<b>1.219.293.000,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	520.000.000,00	399.865.000,00	76,90	68.760.000,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	30.000.000,00	-	0,00	99.638.000,00
3	Retribusi Terminal	600.000.000,00	315.600.000,00	52,60	392.400.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	600.000.000,00	359.500.000,00	59,92	392.100.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Hapus)	85.000.000,00	20.100.000,00	23,65	23.950.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000,00	100.635.000,00	100,64	63.750.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	325.000.000,00	150.110.000,00	46,19	178.695.000,00
<b>III</b>	<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>	<b>4.978.000.000,00</b>	<b>4.375.341.891,00</b>	87,89	<b>3.395.728.427,00</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000,00	3.055.522.616,00	101,85	2.112.433.236,00
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1.250.000.000,00	649.277.800,00	51,94	917.535.331,00
3	Retribusi Izin Trayek	90.000.000,00	18.045.000,00	20,05	20.350.000,00
4	Retribusi Izin Usaha Perikanan	120.000.000,00	169.540.200,00	141,28	241.045.860,00
5	Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP/TDP)	-	326.756.275,00	100,00	-
6	Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Olah Raga	368.000.000,00	152.700.000,00	41,49	104.364.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	150.000.000,00	-	0,00	-
8	Sumbangan Pihak Ketiga ( Kontraktor )	-	3.500.000,00	100,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.446.000.000,00</b>	<b>14.789.487.141,00</b>	<b>80,18</b>	<b>12.765.797.677,00</b>

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa dari 25 jenis retribusi yang dikelola pada TA 2014, secara keseluruhan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp18.446.000.000,00 realisasi yang dapat dicapai sebesar Rp14.789.487.140,50 atau 80,18%.

### 5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pendapatan deviden, yaitu berasal dari pembagian deviden atas penyertaan modal saham yang berada pada Bank Maluku . Untuk tahun 2014 realisasinya sebesar Rp765.132.728,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 atau 153%.

#### 5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada TA 2014 pos ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-	567.684.100,00	-	-
2	Jasa Giro	500.000.000,00	427.182.683,59	85,44	306.945.703,00
3	Pendapatan Bunga deposito	600.000.000,00	1.961.579.451,57	326,93	499.386.302,00
4	Pendapatan Lainnya	3.612.000.000,00	70.502.500,00	1,95	3.054.140.031,00
5	Penerimaan Lain-lain PAD yg sah	5.435.884.000,00	8.023.039.173,28	147,59	1.993.959.507,00
	JUMLAH	10.147.884.000	11.049.987.908,44	108,89	5.854.431.543,00

Rincian penerimaan di atas memperlihatkan bahwa pada TA 2014, pos penerimaan bunga deposito memberikan kontribusi prosentase kenaikan realisasi penerimaan terbesar yaitu Rp1.961.579.452,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada TA 2013, maka penerimaan TA 2014 mengalami kenaikan realisasi yaitu sebesar Rp5.195.556.365,44 (88,75%).

Jumlah Lain2 PAD yang sah di LRA sebesar Rp11.049.987.908,44  
Pendapatan dana kapitasi (Rp 1.816.860.405,00)  
Penjualan aset tetap (Rp 567.684.100,00)

Jumlah Lain2 PAD yang sah di LAK sebesar Rp 8.665.443.403,44

#### 5.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Provinsi. Untuk TA 2014 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Ternate melalui Kas Daerah terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	Dana Bagi Hasil Pajak	26.700.000.000,00	22.882.946.702,00	85,70	29.628.043.318,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	7.772.000.000,00	15.353.542.424,00	197,55	11.725.673.617,00
3	Dana Alokasi Umum	536.443.879.000,00	536.443.879.000,00	100,00	462.645.746.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	59.724.230.000,00	59.724.230.000,00	100,00	44.427.830.000,00
	JUMLAH	630.640.109.000,00	634.404.598.126,00	100,60	548.427.292.935,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2014 realisasi Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar 102,17% dan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada TA 2013, maka terjadi peningkatan sebesar Rp109.137.595.495,00 atau 18,01%.

### 5.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan, untuk TA 2014 realisasi penerimaan pos ini terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	Dana Bagi Hasil Pajak	26.700.000.000,00	22.882.946.702,00	85,70	29.628.043.318,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	7.772.000.000,00	15.353.542.424,00	197,55	11.725.673.617,00
3	Dana Alokasi Umum	536.443.879.000,00	536.443.879.000,00	100,00	462.645.746.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	59.724.230.000,00	59.724.230.000,00	100,00	44.427.830.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>630.640.109.000,00</b>	<b>634.404.598.126,00</b>	<b>100,60</b>	<b>548.427.292.935,00</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar 100,60% dimana sebagian besar pos penerimaan memiliki realisasi di atas 100%, dan hanya penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang memiliki realisasi di bawah 100,00% yaitu 85,70%.

### 5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pos Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian, terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	Dana Otonomi Khusus	-	885.328.000,00	100,00	-
2	Dana Penyesuaian	60.500.000.000,00	63.424.586.000,00	104,83	51.240.275.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>60.500.000.000,00</b>	<b>64.309.914.000,00</b>	<b>106,30</b>	<b>51.240.275.000,00</b>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan pada Tahun 2014 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2013, yaitu sebesar Rp13.069.639.000,00 atau 25,51%. Untuk dana otonomi khusus adalah Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi ( P2D2 ) Tahun 2014.

### 5.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Pos Transfer Pemerintah Provinsi merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya. Untuk realisasi penerimaan TA 2014 sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	PKB	1.250.000.000,00	4.122.418.616,00	329,79	1.659.932.565,00
2	BBNKB	2.000.000.000,00	7.954.337.071,00	397,72	1.532.322.894,00
3	PBBKB	5.500.000.000,00	4.249.324.473,00	77,26	3.148.430.149,00
4	Pajak Air Permukaan	100.000.000,00	105.256.752,00	105,26	-
	<b>Jumlah</b>	<b>8.850.000.000,00</b>	<b>16.431.336.912,00</b>	<b>185,66</b>	<b>6.340.685.608,00</b>

Tabel rincian di atas memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan untuk pos ini mencapai target penerimaan dari yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp8.850.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.431.336.912,00 atau 185,66%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada TA 2013, maka terjadi peningkatan sebesar Rp10.090.651.304,00 atau 159,14%.

### 5.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Realisasi penerimaan pada TA 2014 seluruhnya berasal dari pendapatan PT. Taspen, dianggarkan sebesar Rp260.000.000,00 realisasi selama tahun 2014 sebesar Rp51.050.100,00 atau 19,63 %. Realisasi Tahun 2013 sebesar Rp119.009.570,00.

## 5.2. Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	Belanja Operasi	612.703.287.461,00	572.034.507.400,00	93,36	512.299.434.258,00
2	Belanja Modal	162.211.558.539,00	149.189.430.887,24	91,97	127.082.093.635,00
3	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	9.686.580.000,00	96,87	5.123.755.420,00
	JUMLAH	784.914.846.000,00	730.910.518.287,24	93,12	644.505.283.313,00

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah TA 2014 ditargetkan sebesar Rp784.914.846.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2014 sebesar Rp730.910.518.287,00 atau 93,12%, sehingga sisa anggaran di tahun 2014 yang tidak dapat diserap sebesar Rp54.004.327.713,76 atau 6,88%.

Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah TA 2014 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2013 yang tercatat sebesar Rp644.505.283.313,00 terlihat peningkatan/kenaikan realisasi belanja di tahun 2014 sebesar Rp86.405.234.974,24 atau 13,41%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, serta Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) TA 2014, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.2.1. Belanja Operasi

Perincian Belanja Operasi sbb :

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	459.135.318.751,00	427.638.664.005,00	93,14	379.405.767.226,00
2	Belanja Barang	142.678.968.710,00	133.808.505.425,00	93,78	125.498.895.812,00
3	Belanja Bunga	-	-	0,00	218.856.504,00
4	Belanja Hibah	5.350.000.000,00	5.300.000.000,00	99,07	4.739.102.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	5.000.500.000,00	4.799.967.700,00	95,99	1.922.121.596,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	538.500.000,00	498.370.270,00	92,55	520.739.120,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>612.703.287.461,00</b>	<b>572.045.507.400,00</b>	<b>93,36</b>	<b>512.305.482.258,00</b>

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi TA 2014 diproyeksikan Rp612.703.287.461,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2014 mencapai Rp572.045.507.400,00 atau 93,36%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp40.657.780.061,00 atau 6,64%.

#### a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai TA 2014 diproyeksikan sebesar Rp459.135.318.751,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir TA 2014 sebesar Rp427.638.664.005,00 atau 93,14%, dari realisasi tersebut, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp31.496.654.746,00 atau 6,86%. Realisasi tersebut diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru sebesar Rp67.953.538.070,00), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, juga termasuk belanja Jaminan Kesehatan Nasional (Dana Kapitasi) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Puskesmas yang ada di Kota Ternate sejumlah Rp1.273.829.155,00. Belanja dana kapitasi ditransfer tidak melalui Kas Daerah, tapi di transfer langsung pada rekening puskesmas masing-masing.

Berdasarkan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 900/220/SJ tanggal 5 Mei 2014, menginstruksikan agar Pemerintah Daerah melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja dana dimaksud. Sehingga pada Laporan Arus Kas (LAK) untuk Belanja

pegawai tidak sama dengan belanja pegawai di LRA karena harus di kurangi dengan realisasi belanja FKTP tersebut.

#### b. Belanja Barang

Belanja Barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Belanja Barang TA 2014 ditargetkan sebesar Rp142.678.968.710,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2014 mencapai sebesar Rp133.808.505.425,00 atau 93,78%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp8.870.463.285,00 atau 6,22%. Rincian belanja barang sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	8.362.441.278,00	8.049.894.672,00	96,26
2	Belanja Bahan/Material	25.522.199.700,00	24.801.698.190,00	97,18
3	Belanja Jasa Kantor	20.264.637.216,00	17.706.293.645,00	87,38
4	Belanja Premi Asuransi	2.017.940.000,00	1.930.312.163,00	95,66
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.693.905.574,00	6.252.451.086,00	93,41
6	Belanja Cetak Dan Penggandaan	8.830.065.125,00	8.276.877.556,00	93,74
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.244.782.000,00	2.080.138.600,00	92,67
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	544.725.000,00	523.625.000,00	96,13
9	Belanja Sewa Alat Berat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	992.569.600,00	987.869.600,00	99,53
11	Belanja Makanan Dan Minuman	11.138.238.520,00	10.375.708.634,00	93,15
12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	1.106.743.500,00	1.084.076.000,00	97,95
13	Belanja Pakaian Kerja	527.190.500,00	410.515.425,00	77,87
14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	656.200.000,00	655.805.000,00	99,94
15	Belanja Perjalanan Dinas	38.399.358.354,00	35.737.544.103,00	93,07
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.712.500.000,00	1.537.500.000,00	89,78
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1.276.647.500,00	1.176.825.500,00	92,18
18	Belanja Pemeliharaan	6.218.339.775,00	6.076.572.465,00	97,72
19	Belanja Jasa Konsultansi	2.147.318.068,00	2.179.690.870,00	101,51
20	Belanja Barang yg Akan Diserahkan Kpd Masyarakat/Phak 3	4.014.167.000,00	3.956.106.916,00	98,55
	JUMLAH	142.678.968.710,00	133.808.505.425,00	93,78

#### c. Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan beban bunga pinjaman jangka pendek pada TA 2014 adalah nihil tahun 2013 sebesar Rp218.856.504,00

#### d. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk pemberian hibah dalam bantuan uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya atau kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah TA 2014 semula diproyeksikan sebesar Rp5.350.000.000,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir TA 2014 sebesar Rp5.300.000.000,00 atau 99,07%, terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,93%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PKK Kota Ternate	700.000.000,00	700.000.000,00	100
2	Dharma Wanita Kota Ternate	500.000.000,00	500.000.000,00	100
3	Pramuka	600.000.000,00	600.000.000,00	100
4	KORPRI	500.000.000,00	500.000.000,00	100
5	KONI Kota Ternate	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100
6	PMI	300.000.000,00	300.000.000,00	100
7	KNPI	300.000.000,00	300.000.000,00	100
8	Komisi Penanggulangan AIDS	250.000.000,00	250.000.000,00	100
9	Badan Amil Zakat	200.000.000,00	200.000.000,00	100
10	KPU	300.000.000,00	250.000.000,00	83,33
11	PANWAS	100.000.000,00	100.000.000,00	100
	Jumlah	5.350.000.000,00	5.300.000.000,00	99,07

#### e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja ini digunakan untuk pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial TA 2014 diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2014 sebesar Rp4.799.967.700,00 atau 95,99%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp200.532.300,00 atau 4,01%. Bantuan Sosial ini diberikan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Keagamaan.

Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2014 terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Mesjid/Mushola	2.687.500.000,00
2.	Tamah Pendidikan Alquran	370.000.000,00
3.	Bantuan Pendidikan	44.000.000,00
4.	Pondok Pesantren	75.000.000,00
5.	Bantuan Gereja	210.000.000,00
6.	Bantuan Kedaton Ternate	806.967.700,00
7.	Lahan Pekuburan	200.000.000,00
8.	Bantuan Pesparawi	240.000.000,00
9.	PHBI	79.000.000,00
10.	Bantuan Pengobatan	20.000.000,00
11.	KNPI	25.000.000,00
12.	Bantuan Banjir dan kebakaran	25.000.000,00
13.	Bantuan Forum Pengajian	17.500.000,00
	TOTAL	4.799.967.700,00

#### f. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan Keuangan adalah Belanja bantuan yang diperuntukan untuk kegiatan Partai Politik. Belanja bantuan keuangan pada Tahun 2014 diproyeksikan sebesar

Rp538.500.000,00. Realisasi pada akhir TA 2014 sebesar Rp498.370.270,00 atau 92,55% .sedangkan anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp40.129.730,00 atau 7,45 %. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	DPD Golkar	154.796.060,00	154.796.060,00	-
2	DPD Demokrat	74.298.560,00	74.298.560,00	-
3	DPD PAN	53.102.760,00	53.102.760,00	-
4	DPC PDI-P	47.164.700,00	47.164.700,00	-
5	DPC Hanura	36.429.270,00	36.429.270,00	-
6	DPD PKS	36.429.270,00	36.429.270,00	-
7	DPC PPP	30.653.010,00	30.653.010,00	-
8	DPC PBB	24.803.940,00	24.803.940,00	-
9	DPC PBR	22.368.850,00	-	22.368.850,00
10	DPC Gerindra	21.398.050,00	21.398.050,00	-
11	DPD PKPB	10.557.450,00	10.557.450,00	-
12	DPC PKB	8.737.200,00	8.737.200,00	-
	sisa Dana	17.760.880,00		17.760.880,00
	Jumlah	538.500.000,00	498.370.270,00	40.129.730,00

## 5.2.2 BELANJA MODAL

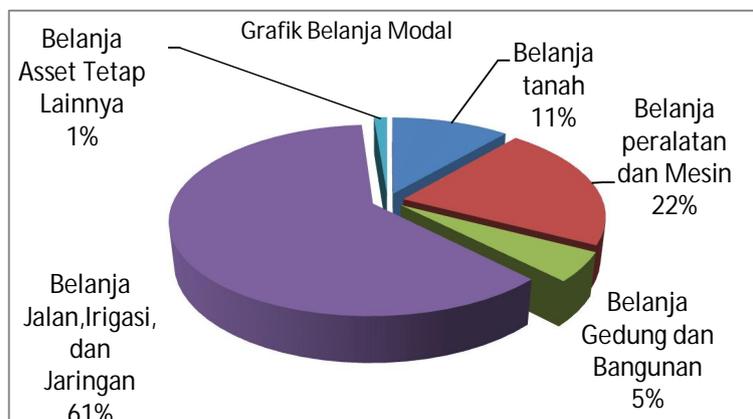
Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal pemerintah Kota Ternate adalah pada TA 2014 sebagai berikut :

NO	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	Belanja tanah	11.633.635.000	11.608.587.950,00	99,78	4.814.974.348
2	Belanja peralatan dan Mesin	23.944.840.000	22.126.411.941,00	92,45	24.505.475.335
3	Belanja Gedung dan Bangunan	59.917.421.399	51.118.080.529,76	85,31	52.718.360.690
4	Belanja Jalan,Irigasi,dan Jaringan	64.744.787.740	63.034.981.241,48	97,36	44.306.034.462
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.970.874.400	1.290.369.225,00	65,47	737.248.800
6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	162.211.558.539	149.178.430.887,24	91,97	127.082.093.635

Pada TA 2014 ini belanja modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp162.211.558.539,00 dan direalisasikan sebesar Rp149.178.430.887,24 atau 91,97% . Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal TA 2013 sebesar

Rp127.082.093.635,00 maka secara keseluruhan dapat dilihat terjadi kenaikan sebesar Rp22.096.337.252,24. Realisasi belanja modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama TA 2014.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos belanja modal TA 2014 .



### 5.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Pos belanja ini diperuntukan bagi keperluan penanganan bencana alam , bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Ternate. Pada TA 2014 dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp9.686.580.000,00 atau 96,87%. Realisasi tahun 2013 adalah Rp5.123.755.420,00

### 5.2.4. TRANSFER

Pos transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Ternate ke entitas pelaporan lain. Pada TA 2014 pemerintah Kota Ternate tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran Transfer.

### 5.3. SURPLUS/ DEFISIT

Dalam APBD TA 2014, pemerintah Kota Ternate mengalami defisit anggaran sebesar (Rp30.170.853.000,00) namun dalam realisasinya terjadi surplus anggaran sebesar Rp42.051.592.192,70 Surplus anggaran yang terjadi disebabkan oleh realisasi penerimaan daerah melebihi target yang ditetapkan dan realisasi belanja daerah lebih rendah dari pada alokasi anggaran .

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	Surplus/Defisit	( 30.170.853.000,00 )	42.051.592.192,70	139,38	5.010.014.187,00
	J u m l a h	( 30.170.853.000,00 )	42.051.592.192,70	139,38	5.010.014.187,00

#### 5.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah Kota Ternate terutama dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

##### 5.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Pos penerimaan pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksud untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan Kota Ternate untuk TA 2014 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	Penggunaan Silpa	-	(17.900.126.387,00)	100,00	(14.430.759.540,00)
2	Pencairan Dana Cadangan	-			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	-			
4	Penerimaan Pinjaman daerah	36.520.853.000,00			
	Jumlah	-	(17.900.126.387,00)	100,00	(14.430.759.540,00)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan TA 2014 seluruhnya berasal dari penggunaan SIKPA yang berasal dari sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar (Rp17.822.064.283,00)

##### 5.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Ternate yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksud untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan Kota Ternate untuk TA 2014 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Pemda	6.350.000.000,00	5.750.000.000,00	90,55	5.579.600.000,00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-		-
	Jumlah	6.350.000.000,00	5.750.000.000,00	90,55	5.579.600.000,00

Tabel diatas memperlihatkan dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.350.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp5.750.000.000,00 atau 90,55%.

##### 5.4.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Pos sisa lebih pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama TA 2014.

No.	Uraian	Anggaran 2014	Realisasi 2014		Realisasi 2013
			Rp	%	
1	SILPA / (SIKPA)	-	18.401.465.805,70	-	(17,822,064,283.00)
	Jumlah	-	18.401.465.805,70	-	(17,822,064,283.00)

SILPA untuk TA 2014 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp18.401.465.805,70, apabila dibandingkan dengan realisasikan SILPA tahun Anggaran 2013 sebesar (Rp17.822.064.283,00) maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp35.758.560.941,89 atau 200,64%.

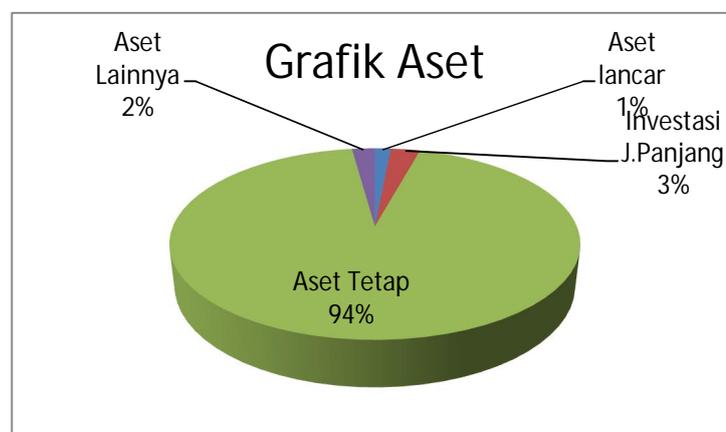
### 5.5. ASET

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam neraca Pemerintah Kota Ternate. Aset terbagi dalam :

No	Uraian	31 Des 2014 (Rp)	31 Des 2013 (Rp)
1	Aset Lancar	34.339.222.817,70	10.169.961.313,00
2	Investasi jangka Panjang	51.339.750.575,39	37.212.066.015,00
3	Aset Tetap	1.760.321.580.831,84	1.380.785.222.322,00
4	Aset Lainnya	68.667.630.064,65	23.617.317.908,00
	JUMLAH	1.914.668.184.289,58	1.451.784.567.558,00

Berdasarkan rincian aset diatas terlihat bahwa secara umum sampai dengan 31 Desember 2014 terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebesar Rp463.835.319.957,59 atau 31,95%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sebagian besar terdiri dari aset tetap, yaitu 94,74% dari keseluruhan aset yang dimiliki. berikut komposisi aset Kota Ternate.

#### Grafik Komposisi Aset Tahun 2014



#### 5.5.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 31 Desember 2014 terdiri dari :

No	Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1	Kas di Kas BUD	17.808.241.081,89	11.519.434,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	24.311.500,00	9.400.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	50.648.336,00	314.260.712,00
4	Kas di FKTP	543.031.250,00	-
4	Piutang Pajak	5.354.562.799,00	31.017.900,00
5	Piutang Retribusi	62.027.629,00	
6	Piutang Dana Bagi Hasil	6.748.217.345,00	6.149.976.101,00
7	Persediaan	3.748.182.876,00	3.653.787.166,00
	TOTAL	34.339.222.817,70	10.169.961.313,00

Berdasarkan tabel rincian aset lancar di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan pada posisi Aset lancar tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp24.169.261.504,70 atau 237,65%.

#### 5.5.1.1 Kas di Kas BUD

Pos kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekening Giro	Nilai (Rp)
1	Bank Maluku Rek 0601022001	17.675.129.3789,70
2	Bank Maluku Rek 0601002024	0,00
3	Bank Maluku Rek 0601002034	0,00
4	Bank Maluku Rek 0601002014	0,00
5	BNI Rek 0086130053	2.697.420,00
	Jumlah	17.677.826.809,70

Sesuai tabel diatas, saldo kas di Kas Daerah menurut rekening giro sebesar Rp17.677.826.809,70 sedangkan saldo kas menurut Laporan sebesar Rp17.808.241.081,89, terdapat selisih sebesar Rp130.414.273,00 yang terdiri dari 2 SP2D Nomor 09169/SP2D/12005/2014 sebesar Rp30.250.000,00 potongan Rp3.300.000,00 nilai bersih Rp26.950.000,00 dan 09166/SP2D/20101/2015 sebesar Rp18.785.000,00 potongan Rp2.049.273,00 nilai bersih Rp16.735.727,00 yang tidak sempat cair pada tahun 2014 dan dicairkan pada tahun 2015, serta pengembalian belanja pakaian dinas DPRD sebesar Rp174.100.000,00 yang sementara ditahan oleh Kejaksaan. Dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo kas di BUD menurut Rekening Koran	Rp 17.677.826.809,70
Di kurangi nilai bersih dua sp2d yang tidak cair	(Rp 43.685.727,00)
Di tambah dana pakaian dinas	<u>Rp 174.100.000,00</u>
Saldo Kas di Laporan	Rp 17.808.241.082,70

Selain 5 rekening tersebut, BUD juga memiliki dan menguasai Rekening Giro Bank Maluku dengan nomor rekening 0601002044 yang dipergunakan untuk menampung

retur pengiriman uang yang dikembalikan oleh bank lain pada saat kliring, dikarenakan kesalahan input nama dan nomor rekening penerima pada SP2D. Saldo rekening giro tersebut per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.141.806.297,00. Saldo rekening retur disajikan secara *extracomptabel*, dikarenakan merupakan rekening dalam penguasaan BUD, tetapi bukan merupakan bagian dari Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2014. Pengiriman kembali uang, dilakukan oleh Bank Maluku berdasarkan surat pemberitahuan dari BUD mengenai pembetulan nama dan nomor rekening yang seharusnya. Atas jasa giro rekening, sudah dicatat sebagai penerimaan daerah.

#### 5.5.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Saldo kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp24.311.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	JUMLAH (Rp)
1.	Dinas Pertanian	1.665.000,00
2.	Dinas Perhubungan	8.800.000,00
3.	Dinas Pariwisata	3.200.000,00
4.	Dinas Pendapatan	10.646.500,00
	TOTAL	24.311.500,00

Pada saat pemeriksaan oleh Tim BPK saldo tersebut telah disetor ke Kas Daerah.

#### 5.5.1.3. Kas Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pos untuk menampung sisa kas belanja, kas pajak pemerintah pusat yang dipungut dan tidak termasuk saldo kas yang berasal dari jasa giro atas rekening koran Bendahara Pengeluaran yang masih berada di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretaris Daerah	22.966.231,00
2	Bappeda	17.390.071,00
3	Dinas Pendidikan	6.264.534,00
4	Dinas Kesehatan	3.177.500,00
5	Dinas Pasar	850.000,00
	TOTAL	50.648.336,00

Saldo kas belanja sebesar Rp50.648.336,00 berasal dari sisa kas belanja yang belum disetor ke kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 oleh Bendahara Sekretaris Daerah, Bappeda Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pasar belum di setor ke Kas Daerah dan sampai pada saat penyusunan laporan ini sisa kas tersebut sudah disetor ke kas daerah.

#### 5.5.1.4. Kas di FKTP.

Saldo kas di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) adalah Rp543.031.250,00 yaitu sisa kas dana kapitasi jaminan kesehatan nasional yang ada di masing-masing puskesmas di Kota Ternate dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA FKTP	Pendapatan	Belanja	Saldo Buku
1.	Puskesmas Jambula	59.001.652,00	44.388.673,00	14.612.979,00
2.	Puskesmas Gambesi	131.249.445,00	95.114.989,00	36.134.456,00
3.	Puskesmas Kalumata	329.197,728,00	227.512.158,00	101.685.570,00
4.	Puskesmas Kalumpang	376.029,687,00	359.728.599,00	16.301.088,00
5.	Puskesmas Kota	187.725,546,00	112.510.500,00	75.215.046,00
6.	Puskesmas Sulamadaha	144.989,094,00	110.939.126,00	34.049.968,00
7.	Puskesmas Siko	307.960,783,00	139.438.353,00	168.522.430,00
8.	Puskesmas Mayau	62.349,419,00	50.882.753,00	11.466.666,00
9.	Puskesmas Hiri	79.282,403,00	55.652.477,00	23.629.926,00
10.	Puskesmas Moti	139.074.648,00	77.661.527,00	61.413.121,00
	TOTAL	1.816.860.405,00	1.273.829.155,00	543.031.250,00

#### 5.5.1.5 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing Rp5.354.562.799,00 dan sebesar Rp31.017.900,00. Jumlah tersebut adalah Piutang Pajak Restoran, yang merupakan sisa kurang bayar atas pajak restoran Sari Bundo sebesar Rp31.017.900,00. Sampai dengan TA 2013, SKPDKB yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan adalah senilai Rp100.000.000,00, dan atas SKPDKB tersebut, restoran Sari Bundo telah menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp100.000.000,00. SKPDKB sebesar Rp31.017.900,00 (Rp131.017.900,00 – Rp100.000.000,00) belum diterbitkan dan Piutang Tambahan di 2014 yang belum terbayar sesuai daftar tambahan piutang dari Dinas Pendapatan sebesar Rp3.786.747.190,00 dan piutang PBB sebesar Rp1.536.797.709,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	JENIS PAJAK	31 Des 2014 (Rp)	31 Des 2013 (Rp)	Bertambah/(Berkurang)
1.	Pajak Hotel	2.189.620.540,00	-	2.189.620.540,00
2.	Pajak Restoran	1.472.761.727,00	31.017.900,00	1.441.743.827,00
3.	Pajak Reklame	91.661.451,00	-	91.661.451,00
4.	Pajak Air tanah	63.721.372,00	-	63.721.372,00
5.	Pajak Bumi Bangunan	1.536.797.709,00	-	1.536.797.709,00
	TOTAL	5.354.562.799,00	31.017.900,00	5.323.544.899,00

#### 5.5.1.6. Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp62.027.629,00.

Saldo tersebut merupakan piutang Retribusi pasar dengan rincian sebagai berikut :

No.	PASAR	JUMLAH (Rp)	31 Des 2013	Bertambah/(Berkurang)
1.	Pasar Gamalama	20.967.333,00	-	20.967.333,00

2.	Pasar Sayur	654.545,00	-	654.545,00
3.	Pasar Kie Raha	13.235.500,00	-	13.235.500,00
4.	Pasar Bastiong	5.094.000,00	-	5.094.000,00
5.	Pasar Dufa-Dufa	270.000,00	-	270.000,00
6.	Rumah Toko	15.000.000,00	-	15.000.000,00
7.	Pasar Higienis	6.806.250,00	-	6.806.250,00
	TOTAL	62.027.628,00	-	62.027.628,00

#### 5.5.1.7. Piutang Dana Bagi hasil.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp6.748.217.345,00 dan Rp6.149.976101,00.

Saldo tersebut merupakan piutang dana transfer dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang diperoleh berdasarkan perhitungan selisih antara alokasi Pajak Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Maluku Utara TA 2014, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah sebesar Rp13.202.226.638,00, dibandingkan dengan realisasi nilai transfer bagi hasil TA 2014 dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diterima di Kas Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp6.454.009.293,00. Rincian pos piutang sebagaimana terlihat pada *lampiran 1*.

#### 5.5.1.8 Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing Rp3.748.182.876,00 dan Rp3.653.787.166,00, Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Kota Ternate dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember 2014 terdiri dari Barang Pakai habis, Alat Tulis Kantor, Obat-Obatan, Alat Kesehatan, dan Blanko KTP/KK dan barang cetakan (Karcis dll), rincian persediaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

NO	SKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	Tata Kota dan Pertamanan	47.306.200,00
2	Inspektorat	885.800,00
3	Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial	702.000,00
4	Dinas Pasar	317.200,00
5	Dinas Pendapatan	461.951.500,00
6	Kantor Pemadam Kebakaran	41.140.000,00
7	Kantor Kesbang Linmas	317.500,00
8	Dinas Kesehatan	3.004.711.379,00
9	Bappeda	279.900,00
NO	SKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
10	Sekretaris DPRD	829.000,00

11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.662.000,00
12	Dinas Pendustrian dan Perdagangan	172.511.397,00
13	Dinas Pengelola Keuangan dan aset Daerah	14.434.000,00
14	BLH	135.000,00
	Jumlah	3.748.182.876,00

#### 5.5.2.1.1 Investasi Non Permanen lainnya

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp80.751.000,00 dan Rp320.532.000,00. Investasi non permanen lainnya tersebut berupa Dana Bergulir. Dana Bergulir adalah dana yang disalurkan Pemerintah Kota Ternate dalam rangka penguatan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah. Dana tersebut disalurkan melalui anggaran pengeluaran pembiayaan.

Nilai perolehan Dana Bergulir Pemerintah Kota Ternate adalah sebesar Rp3.106.000.000,00, yang berasal dari APBD Kota Ternate TA 2002 sampai dengan TA 2009 dengan rincian sebagai berikut:

TA	Realisasi (Rp)
2002	435.900.000,00
2003	727.500.000,00
2004	487.600.000,00
2005	365.000.000,00
2006	400.000.000,00
2007	-
2008	300.000.000,00
2009	390.000.000,00
2010	-
2011	-
Jumlah	3.106.000.000,00

Sejak TA 2010, Pemerintah Kota Ternate belum menambah investasinya lagi. Pengelolaan Dana Bergulir ini seluruhnya diserahkan kepada pengelola dana bergulir. Rincian dana berdasarkan pengelola dana bergulir adalah sebagai berikut:

Pengelola Dan Bergulir	Nilai (Rp)
BRI	435.900.000,00
KSU Makugawene	2.470.100.000,00
ISAP	20.000.000,00
BKCSK/PKK	150.000.000,00
LEPP-M3	30.000.000,00
Jumlah	3.106.000.000,00

Laporan dana bergulir Tahun 2014 sesuai Surat Nomor 518/19/KUKM-KT/II/2015 tanggal 3 Februari 2015 diperoleh informasi bahwa pengelola dana bergulir telah melakukan perguliran dana kepada para debitur, baik dari dana yang diperoleh dari APBD, maupun dana yang berasal dari pengembalian debitur (perguliran). Posisi per 31 Desember 2014, nilai realisasi dana bergulir dan nilai piutang yang belum dibayar para debitur dapat ditunjukkan sebagai berikut:

No	Pengelola Dana Bergulir	Nilai Realisasi Dana Bergulir	Nilai Piutang (Dana di debitor)
1	BRI	527.000.000,00	378.772.250,00
2	KSU Makugawene	3.453.400.000,00	2.049.012.924,00
3	PKK/BKCSK	151.850.000,00	151.850.000,00
4	ISAP	20.000.000,00	20.000.000,00
5	LEPP-M3	30.000.000,00	30.000.000,00
	JUMLAH	4.182.250.000,00	2.629.635.174,00

Pemerintah Kota Ternate telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir, yang menentukan klasifikasi ketertagihan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir sebagai berikut:

- Dapat ditagih, jika umur piutang 1-2 tahun dari jadwal jatuh tempo pinjaman
- Diragukan dapat ditagih, jika umur piutang 2-3 tahun dari jadwal jatuh tempo pinjaman
- Tidak dapat ditagih, jika umur piutang lebih dari 3 tahun dari jadwal jatuh tempo pinjaman.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dari total nilai dana di debitor sebesar Rp2.629.635.174,00, setelah dilakukan perbandingan umur piutang per debitor, diketahui nilai dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah sebesar piutang dana bergulir yang dapat ditagih, yaitu sebesar Rp320.532.000,00.

Rincian debitor dana bergulir dan penentuan klasifikasi umur piutang dalam *Lampiran 2*.

#### 5.5.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kota Ternate per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp51.258.9999.575,39 dan Rp36.891.534.015,00.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan daerah pemerintah menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, dan bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada pada laporan keuangan perusahaan bersangkutan yang telah diaudit dikalikan dengan persentase kepemilikan. Sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate ini disusun, BUMD yang kepemilikan Pemerintah Kota Ternate mencapai 50% ke atas, hanya bisa memberikan laporan keuangan yang belum *audited*.

Metode yang digunakan yaitu Metode Ekuitas (*Equity Method*) untuk Penyertaan pada PDAM, PD. Citra Gamalama dan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan. Sedangkan Penyertaan Modal pada PT. Bank Maluku menggunakan Metode Biaya (*Cost Method*). Rincian perhitungan nilai penyertaan modal pemerintah daerah per BUMD sebagai berikut:

- PT. Bank Maluku

Investasi berupa penyertaan Modal kepada PT. Bank Maluku terdiri atas 400 lembar saham PT. Bank Maluku (Nomor A BM. 0016501 s.d 0016900) dengan rincian penyertaan modal sebagai berikut:

No	Penyertaan Modal PT. BPDM	Nilai (Rp)
1	Sampai dengan 2005	500.000.000,00
2	Penambahan Tahun 2006	500.000.000,00
3	Penambahan Tahun 2007	500.000.000,00
4	Penambahan Tahun 2009	500.000.000,00
5	Penambahan Tahun 2012	500.000.000,00
6	Penambahan Tahun 2013	500.000.000,00
7	Penambahan Tahun 2014	500.000.000,00
	Jumlah	3.500.000.000,00

Kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PT. Bank Maluku kurang dari 20%, dan Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ternate, sesuai Peraturan WaliKota Nomor 41 Tahun 2008, atas kepemilikan kurang dari 20%, dicatat menggunakan metode biaya. Dengan demikian, nilai PMPD pada PT. Bank Maluku adalah sebesar Rp3.500.000.000,00.

(b) PD. Citra Gamalama

Kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PD. Citra Gamalama adalah sebesar 100%. Nilai penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Ternate sampai dengan TA 2013 adalah sebesar Rp3.219.488.795,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyertaan Modal PD Citra Gamalama	Nilai (Rp)
Sampai dengan 2005	750.000.000,00
Penambahan Tahun 2006	250.000.000,00
Penambahan Tahun 2008	500.000.000,00
Penambahan Tahun 2009	150.000.000,00
Penambahan Tahun 2011	297.000.000,00
Penerimaan Hibah	93.000.000,00
Penambahan Tahun 2013	1.829.600.000,00
Penambahan Tahun 2014	1.500.000.000,00
Jumlah Penyetoran Modal	5.369.600.000,00
Akumulasi Laba (Kerugian) s/d 2014	(2.150.711.205,00)
Jumlah Ekuitas Pemkot Ternate	3.219.488.795,00

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ternate, sesuai Peraturan WaliKota Nomor 41 Tahun 2008, atas kepemilikan lebih dari 50%, dicatat menggunakan metode ekuitas. Dengan demikian, nilai PMPD Kota Ternate pada PD. Citra Gamalama dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Ternate. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penyertaan modal PD Citra Gamalama sebesar Rp3.219.488.795,00

(c) PDAM

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kota Ternate untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 (*unaudited*), jumlah modal yang

tercatat adalah sebesar Rp34.377.130.972,35. Modal tersebut terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.173.890.154,00, modal hibah sebesar Rp148.480.200,00 dan modal yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp33.054.760.618,35. Dalam Laporan Keuangan PDAM, tercatat akumulasi laba/(rugi) sampai dengan Tahun Buku 2014 adalah sebesar Rp1.234.796.461,86 Dengan demikian, Ekuitas Pemerintah Kota Ternate atas penyertaan modal pada PDAM (dengan pembulatan) sebesar Rp35.611.927.434,21 (Rp34.377.130.972,35 + Rp1.234.796.461,86)

(d) BPR Syariah Bahari Berkesan

PT. BPR Syariah Bahari Berkesan didirikan berdasarkan Akta Notaris Tatiek Nurdjanti, SH, Nomor 48 tanggal 27 Desember 2011. Dalam akta tersebut dinyatakan nama lengkap perusahaan ini adalah PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Bahari Berkesan atau disingkat PT. BPRS Bahari Berkesan. Berdasarkan Surat Nomor 012/DIR/BPRS-BB/I/2014 tanggal 20 Januari 2014, diketahui bahwa nilai susunan Modal Disetor pemilik kepada PT. BPRS Bahari Berkesan berdasarkan RUPS, semula Rp3.010.000.000,00 telah berubah menjadi sebesar Rp8.265.000.000,00 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Saham (lembar)	Nominal (Rp)	Prosentase
1	Pemerintah Kota Ternate	8.000	8.000.000.000,00	96,79%
2	Ir. Arifin Djafar	20	20.000.000,00	0,24%
3	Hj Nursia Abdul Haris	95	95.000.000,00	1,15%
4	Muhammad Hasan Bay	150	150.000.000,00	1,81%
	Total	8.265	8.265.000.000,00	100,00%

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 (*unaudited*), jumlah modal disetor yang tercatat, telah sama dengan hasil RUPS, yaitu sebesar Rp8.265.000.000,00, dengan kepemilikan Pemerintah Kota sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 96,79%.

Pemerintah Kota Ternate sampai dengan TA 2014, telah melakukan pengeluaran pembiayaan dari APBD, untuk operasional persiapan pendirian PT. BPRS Bahari Berkesan dan penyeteroran modal sebesar Rp9.050.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
11-Mar-11	01044/2011	500.000.000,00
1-Jul-11	03517/2011	100.000.000,00
6-Jul-11	03624/2011	32.000.000,00
13-Oct-11	09038/2011	68.000.000,00
21-Nov-11	09992/2011	200.000.000,00
9-Dec-11	10636/2011	900.000.000,00
Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
18-Jan-12	00097/SP2D	1.035.000.000,00
14-Peb-12	00401/SP2D	150.000.000,00

03-Apr-12	01606/SP2D	65.000.000,00
11-Mei-12	02167/SP2D	1.000.000.000,00
5 Maret 2013	00935/SP2D	1.250.000.000,00
7 Maret 2013	01015/SP2D	1.000.000.000,00
2014		2.750.000.000,00
Jumlah		9.050.000.000,00

Dengan demikian terdapat selisih pencatatan pengakuan antara nilai penyertaan bidang Akuntansi DPKAD dengan Direksi PT. BPRS Bahari Berkesan sebesar Rp1.050.000.000,00 (Rp9.050.000.000,00 – Rp8.000.000.000,00). Nilai pengeluaran pembiayaan sebesar selisih tersebut merupakan biaya operasional persiapan pendirian PT. BPRS Bahari Berkesan yang diterima dan dikelola oleh Tim Persiapan Pendirian PT. BPRS Bahari Berkesan, sehingga bukan merupakan bagian dari nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate.

Kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PT. BPRS Bahari Berkesan adalah sebesar 96,79% atau diatas 50%. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ternate, sesuai Peraturan WaliKota Nomor 41 Tahun 2008, atas kepemilikan lebih dari 50%, dicatat menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR Syariah Bahari Berkesan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 (*unaudited*), nilai akumulasi laba/(rugi) sampai dengan Tahun Buku 2014 adalah sebesar Rp278.210.480,56. Berdasarkan data tersebut, total nilai ekuitas PT. BPRS Bahari Berkesan adalah Rp8.543.358.433,26 (Rp8.265.000.000,00 + Rp278.210.480,56+147.953). Dengan demikian, nilai ekuitas Pemerintah Kota Ternate pada PT. BPRS Bahari Berkesan adalah sebesar porsi kepemilikan Pemerintah Kota Ternate dikalikan total nilai ekuitas perusahaan atau sebesar Rp8.269.116.627,55 (96,79% x Rp8.543.358.433,26).

### 5.5.3. Aset Tetap

Jumlah pada pos aset tetap sebesar Rp1.760.321.580.831,24 Merupakan Nilai aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sampai dengan 31 Desember 2014, dengan rincian kelompok aset tetap dan mutasi selama TA 2014 sebagai berikut:

Uraian	Saldo Per 31 Des 2013	Penambahan	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Saldo Per 31 Des 2014
Tanah	236.669.101.791,20	12.356.587.950,00	29.935.162.400,00	54.292.019.431,00	224.668.832.710,20
Peralatan Dan Mesin	116.753.271.978,76	17.119.767.746,98	30.905.179.785,22	6.258.987.588,18	158.519.231.922,79
Gedung Dan Bangunan	503.928.081.148,57	34.543.126.353,01	177.085.005.292,01	5.995.612.862,00	709.560.599.931,59
Jalan, Jaringan dan Irigasi	461.830.900.958,58	45.156.977.442,00	123.702.322.801,93	49.999.244.680,43	580.690.956.522,08
Aset Tetap Lainnya	11.473.038.279,89	2.452.656.333,00	2.924.923.593,12	1.048.037.680,00	15.802.580.526,00
KDP	50.130.828.163,79	27.077.088.107,00	-	6.128.537.052,00	71.079.379.218,79
<b>Total</b>	<b>1.380.785.222.321</b>	<b>138.706.203.932</b>	<b>364.552.593.872</b>	<b>123.722.439.294</b>	<b>1.760.321.580.831</b>

Saldo Akhir 31 Desember 2013 Pemerintah Kota Ternate adalah hasil inventarisasi dan penilaian aset bekerja sama dengan pihak ketiga

(*appraisal*) per 31 Desember 2010 menggunakan nilai wajar, ditambah realisasi belanja modal tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013 yang dicatat sebesar nilai perolehan, namun ditahun 2014 dikoreksi kembali dari nilai wajar menjadi perolehan, sehingga untuk pencatatan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 merupakan hasil koreksi nilai wajar menjadi nilai perolehan per 31 Desember 2010 ditambah mutasi Belanja Modal Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dicatat sebesar nilai perolehan. Nilai aset tetap yang tercantum dalam neraca tidak memperhitungkan penyusutan dan kerusakan sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku di Pemerintah Kota Ternate.

Mutasi aset tetap selama tahun 2014 terdiri dari (1) Penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2014 (2) koreksi nilai wajar menjadi nilai perolehan atas aset yang memiliki nilai perolehan per 31 Desember 2010 (3) Pengurangan yang merupakan nilai koreksi aset tetap yang nilainya lebih kecil dari nilai wajar hasil *appraisal*, dihapuskan dan karena perpindahan (reklasifikasi) antara SKPD dan antar jenis dan (4) koreksi atas pencatatan aset tetap sebelumnya.

**a. Tanah:**

**1) Mutasi tambah**

Penambahan aset tetap Tanah sebesar Rp12.356.587.950,00 sebesar Rp10.987.917.950,00 berasal dari pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah bagian pemerintahan dan sebesar Rp1.368.670.000,00 adalah pengerasan/timbunan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Badan Lingkungan Hidup.

**2).Koreksi Tambah**

Koreksi tambah sebesar Rp29.935.162.400,00 terdiri dari :

- (1) Sebesar Rp26.524.546.000,00 yang berasal dari pengakuan aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang penetapan nilainya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikalikan dengan luas tanah.
- (2) Sebesar Rp3.336.696.400,00 adalah koreksi nilai wajar atas tanah ke nilai perolehan pada Dinas PU, Diknas, DKP, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua.
- (3) Sebesar Rp73.920.000,00 adanya penyerahan tanah yang di hibahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang penetapan nilainya berdasarkan NJOP dikalikan dengan luas tanah.

**3) Koreksi Kurang**

Terdapat koreksi kurang sebesar Rp54.292.019.431,00 terdiri dari :

- (1) Sebesar Rp15.773.582.93,00 yang merupakan koreksi nilai wajar atas Tanah ke nilai perolehan.
- (2) Sebesar Rp11.993.890.500,00 adalah koreksi pencatatan ganda atas tanah pada kantor Kecamatan Ternate Tengah.
- (3) Sebesar Rp26.524.546.000,00 adalah reklasifikasi menjadi kemintraan pihak ketiga.

**b. Peralatan dan mesin**

**1) Mutasi tambah**

Penambahan peralatan dan mesin pada tahun 2014 adalah sebesar Rp17.144.127.747,00 yang merupakan realisasi Belanja Modal tahun 2014.

**2) Koreksi Tambah**

Koreksi tambah sebesar Rp30.905.179.775,00 terdiri dari : (1) Koreksi Nilai Wajar ke nilai perolehan sebesar Rp29.536.914.275,00 (2) Perpindahan (mutasi) penggunaan aset dari SKPD sebesar Rp352.590.750,00 (3) perolehan aset tetap dari dana APBN tahun 2014 berupa hibah pada Dinas Pendidikan Nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp790.999.750,00 ditambah koreksi hasil pemeriksaan sebesar Rp224.675.000,00. Penambahan peralatan dan mesin secara rinci adalah sebagai berikut:

Jenis Peralatan dan Mesin	Nilai (Rp)			
	Realisasi Belanja Modal	Koreksi Nilai	Pemindahan Status Penggunaan (Mutasi)	Hibah
Alat-alat Besar	549.005.000,00	4.195.166.073,00	-	-
Alat-alat Angkutan	5.082.722.130,00	14.135.804.014,00	325.172.750,00	466.289.000,00
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	525.681.575 ,00	320.606.539,00	0	0
Alat-alat Pertanian / Peternakan	185.900.000,00	191.417.394,00	0	0
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	6.052.498.788,00	8.786.085.326,00	27.418.000 ,00	438.060.000,00
Alat-alat Studio dan Komunikasi	420.202.386,00	686.720.851,00		10.532.500 ,00
Alat-alat Kedokteran	792.834.900,00	585.000,00		-
Alat-alat Laboratorium	3.511.141.968,00	2.155.755.338,00		25.140.760,00
Alat-alat Keamanan	24.141.000,00	80.448.500,00		75.652.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.144.127.747,00</b>	<b>30.552.589.035,00</b>	<b>352.590.750,00</b>	<b>1.015.674.760,00</b>

**3). Koreksi Kurang**

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp6.283.347.588,00 terdiri dari:

- a. Mutasi Alat-alat angkut roda 4 (empat), roda 2 (dua) dan laPT.op yang merupakan peRpindahan penggunaan peralatan dan mesin antar SKPD sebesar Rp352.590.750,00.

- b. Koreksi nilai dari nilai wajar menjadi nilai perolehan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp1.330.000,00.
- c. Pencatatan ganda kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) pada Sekretariat Daerah dan Bappeda sebesar Rp567.691.200,00.
- d. Koreksi Peralatan dan mesin pengadaan tahun 2008 dan setelahnya dengan harga perolehan satuan dibawah Rp1.000.000,00 (*extracountable*) yang masih tercatat sebagai aset tetap sebesar Rp2.815.187.094,00.
- e. Reklasifikasi Peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat tetapi masih dicatat sebagai aset tetap sebesar Rp1.458.944.000,00.
- f. Koreksi atas kendaraan bermotor yang telah dilelang sebesar Rp1.068.267.744,00 tapi belum dikeluarkan dari pencatatan BMD.
- g. Koreksi peralatan dan mesin yang tercatat sebagai penambahan aset dari belanja modal tetapi tidak memenuhi kriteria sebagai penambahan aset karena hanya berupa pembuatan web site dan biaya berlangganan internet pada Kantor Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp19.360.000,00.

### **c. Gedung dan bangunan**

#### **1). Mutasi tambah**

Penambahan aset gedung dan bangunan sebesar Rp34.543.126.353,00 seluruhnya berasal dari pelaksanaan kegiatan pada TA 2014.

#### **2). Koreksi Tambah**

Total koreksi tambah gedung dan bangunan sebesar Rp177.085.005.292,00 yang terdiri dari :

- a. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk bangunan sebesar Rp6.128.537.052,00.
- b. Koreksi Nilai Wajar kembali menjadi nilai perolehan sebesar Rp161.361.973.240,00.
- c. Hibah Gedung dan Bangunan dari Pihak Ketiga sebesar Rp7.493.020.000,00 yaitu dari dana APBN Rp7.260.391.000,00 dan dari anggaran APBD Provinsi Maluku Utara sebesar Rp232.629.000,00.
- d. Mutasi penggunaan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.101.475.000,00 terdiri dari mutasi penggunaan aset gedung dan Bangunan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke Dinas Pasar berupa Gedung Pasar Waserda sebesar Rp1.982.200.000,00 dan dari Dinas PU ke Dinas Pasar MCK dari sebesar Rp119.275.000,00.

#### **3). Koreksi kurang**

Pengurangan aset gedung dan bangunan sebesar Rp5,995,612,862,00 terdiri dari :

- a) Pengurangan aset gedung dan bangunan selama TA 2014 adalah sebesar Rp3.962.847.862,00 merupakan koreksi nilai wajar kenilai perolehan.
- b) Mutasi penggunaan aset gedung dan bangunan dari Dinas Perindag ke Dinas Pasar sebesar Rp1.982.200.000,00.
- c) Koreksi aset Gedung dan Bangunan tahun 2008 yang harga perolehan dengan satuan dibawah Rp1.000.000,00 (*extracountable*) yang masih tercatat sebagai aset tetap pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan sebesar Rp50.565.000,00.

#### **d. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

##### **1). Mutasi tambah**

Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp45.156.977.442,00 berasal dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014.

##### **2). Koreksi Tambah**

Total koreksi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp123.702.322.802,00 yang terdiri dari :

- a. Koreksi nilai wajar ke nilai perolehan sebesar Rp114.436.099.692,00.
- b. Koreksi tambah pembuatan jalan setapak *paving block* pada pekerjaan Taman Kehati (BLH) sebesar Rp78.643.110,00 dikapitalisasi pada rekening Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- b. Koreksi tambah sset dari Dana Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp9.187.580.000,00.

##### **3). Koreksi Kurang**

Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp49.999.244.680,00 adalah koreksi nilai wajar ke nilai perolehan

#### **e. Aset Tetap Lainnya**

Total Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp14.243.288.526,00 terdiri dari saldo awal sebesar Rp11.473.038.290,00 dan;

##### **1). Mutasi Tambah**

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp894.831.333,00 adalah dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014 pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

##### **2). Koreksi Tambah**

Koreksi tambah sebesar Rp4.482.748.593,00 terdiri dari :

- a. Koreksi nilai wajar ke nilai perolehan sebesar Rp2.865.910.093,00
- b. Penambahan Aset Lainnya sebesar Rp59.013.500 yang merupakan bantuan buku dari dana APBN.
- c. Reklasifikasi aset tetap renovasi sebesar Rp1.775.825.000,00 dari aset lainnya.

### 3). Koreksi Kurang

Koreksi reklasifikasi Aset Tidak Berwujud dari Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Lainnya Sebesar Rp1.048.189.680,00 berupa aset tidak berwujud.

## f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

### 1). Mutasi Tambah

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp27.077.088.107,00 yang seluruhnya terdiri dari KDP Gedung dan Bangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan timbul sebagai akibat belum selesai pekerjaan pembangunan fisik konstruksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

No.	Gedung dan Bangunan	Realisasi sd 31 Des 2014 (Rp)
1.	Pembangunan SDN Salero 2 dan 3 (Tahap II) (Diknas) - Nilai Fisik - Biaya Perencanaan SDn Salero 2 - Biaya Pengawasan SDN Salero 2	772.000.000,00 30.000.000,00 15.660.000,00
2.	Pembangunan Gedung SMK.N 1 ( Diknas) - Biaya Fisik - Biaya Perencanaan - Biaya Pengawasan	667.800.000,00 9.050.000,00 4.550.000,00
3.	Pemangunan Pasar ( Sekda )	2.244.185.807,00
4.	Pembangunan Ruko Bagian Utara ( PU)	3.734.724.000,00
5.	Pembangunan Ruki Bagian Selatan ( PU)	2.823.393.000,00
6.	Pasar Percontohan Lanjutan ( PU )	2.185.625.000,00
7.	Gudang <i>cool box</i> Higiniés ( PU)	594.375.000,00
8.	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong (PU) Infrastruktur Pendukung jalan Kota baru Bastiong (PU)	5.394.898.000,00 93.846.000,00
9.	Jalan Ngade Sone	5.755.698.000,00
10.	Saluran JI Pah.Revolusi Kel .Gamalama	147.450.000,00
11.	Land Mark	2.538.078.300,00
<b>No.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>Realisasi sd 31 Des 2014 (Rp)</b>
12.	Ruko Kelurahan Soasio	65.755.000,00

	TOTAL	27.077.088.107,00
--	-------	-------------------

## 2). Koreksi Kurang

Koreksi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp6.128.537.052,00 pada Tahun 2014 terdiri dari reklasifikasi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset tetap Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi dilakukan karena kegiatan pekerjaan fisik konstruksi untuk aset tersebut telah diselesaikan seluruhnya pada tahun 2014. Berikut rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2014 :

### KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

No	Nama Kegiatan	Resalisasi Belanja s.d.Resalisasi Belanja s.d. 31 Desember 2014 (Rp)
I	KDP Gedung dan Bangunan	
	- Sekretariat Daerah	2.244.185.807,00
	- Dinas Pekerjaan Umum	65.884.356.412,00
	- Dinas Pendidikan	2.520.137.000,00
	- Kecamatan Pulau Batang Dua	430.700.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>71.079.379.219,00</b>

Dengan penjelasan tambahan sebagai berikut :

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan, pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate, dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tersaji pada neraca per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.499.060.000,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut berupa :  
Konstruksi Pengerjaan Pembangunan Bertingkat SDN Salero 2 dan 3 sebesar Rp817.660.000,00 sumber dana berasal dari APBD (DAU) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pekerjaan pembangunan fisik gedung yang dilaksanakan oleh CV. Cakrawala Indah Perkasa dengan Nomor Kontrak : 17/Kontrak-DAU./DPN.KT/CV.CIP/VI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 senilai Rp782.000.000,00 namun ada pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan ke kas daerah sebesar Rp10.000.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 17 Nopember 2014. Adapun biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp782.000.000,00 dan jumlah retensi sebesar 5% dari nilai kontrak.
  - Pekerjaan Perencanaan senilai Rp30.000.000,00 oleh CV. Nur Akbar Perkasa dengan Nomor Kontrak : 08/KONTRAK DAU/PERC.PL/DPN.KT/IV/2014 tanggal 30 April 2014;

- Pekerjaan Pengawasan senilai Rp15.660.000,00 oleh CV. Bumi Karsa dengan kontrak Nomor : 10/KONTRAK DAK/PWS.PL/DPN.KT/CV.BK/VI/2014 tanggal 15 Juni 2014.  
Pekerjaan pembangunan SDN Salero 2 dan 3 untuk tahap I telah selesai dan masih berlanjut ke tahap selanjutnya.
- 2) Konstruksi Pengerjaan Penambahan Ruang Kelas Baru SMK Negeri 1 Kota Ternate dengan nilai sebesar Rp681.400.000,00, sumber dana berasal dari APBD (DAK) yang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut :
- Pekerjaan pembangunan fisik gedung yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Kota Ternate senilai Rp667.800.000,00 dengan Nomor Kontrak : 602.1/01/DIKNAS KT/DAK SMK/IX/2014 tanggal 2 September 2014, jangka waktu penyelesaian pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 2 September 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp667.800.000,00 dan prosentase penyelesaian pekerjaan 80%.
  - Pekerjaan perencanaan senilai Rp9.050.000,00 oleh CV. Nur Akbar Perkasa dengan Nomor Kontrak : 08/KONTRAK DAK/PERC.PL/DPN.KT/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014;
  - Pekerjaan Pengawasan senilai Rp4.550.000,00 oleh CV. Bumi Kisata dengan kontrak Nomor : 10/KONTRAK DAK.PL/PWS.PL/DPN.KT/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
- 3) Konstruksi Dalam pengerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Pasar Kota Ternate Rp2.244.185.807,00, sumber dana berasal dari APBD (DAK) dengan rincian sebagai berikut :
- Pembayaran uang muka sebesar 20% pembangunan gedung Kantor Dinas Pasar yang dilaksanakan oleh PT. Intim Kara dengan Nomor Kontrak : 641/02/KONTRAK-PRASPEM/2014 tanggal 10 September 2014 senilai Rp691.448.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 10 September 2014.
  - Pekerjaan pembangunan fisik gedung Kantor Dinas Pasar yang dilaksanakan oleh PT. Intim Kara dengan Nomor Kontrak : 641/02/KONTRAK-PRASPEM/2014 tanggal 10 September 2014 senilai Rp1.382.896.000,00. Adapun biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.074.344.000,00.
  - Pekerjaan perencanaan teknis untuk pembangunan gedung Dinas Pasar dan Dinas Kesehatan senilai Rp135.000.000,00 oleh CV. Trizali Eng. Consultant dengan Nomor Kontrak : 641/01/KONTRAK-PRASPEM/2014 tanggal 16 September 2014;
  - Pekerjaan pengawasan teknis senilai Rp19.841.807,00 oleh CV. Konteks Design dengan kontrak Nomor : 641/04/KONTRAK-PRASPEM/2014 tanggal 16 September 2014;

- Pekerjaan pembuatan dokumen UPL dan UKL senilai Rp15.000.000,00 sesuai dengan nomor kontrak : 600/01/SPK-PRASPEM/2014 tanggal 01 Agustus 2014; pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Pasar ini belum selesai dan masih dilanjutkan *addendum* sampai bulan Februari tahun 2015. Adapun sisa biaya sebesar : Rp1.382.896.000,00 telah dibayarkan pada bulan Maret tahun 2015 sesuai dengan DPA-Lanjutan 2015.

Untuk serah terima gedung Kantor Dinas Pasar dari Sekretariat Daerah Kota Ternate kepada Dinas Pasar Kota Ternate dilaksanakan pada tanggal 07 April 2015, dengan Berita Acara Serah Terima Aset Bangunan Gedung Kantor Nomor : 641/02/BAST-ASET/2015 tanggal 07 April 2015.

- 4) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan dan belum dimanfaatkan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp65.884.356.412,00 Kota Ternate sesuai rincian *Lampiran 3*.

#### g. Catatan Tambahan

Hal-hal penting yang berkaitan dengan Aset tetap dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat aset berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Ternate namun belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate, sebanyak 16 Bidang Tanah dan Gedung Bangunan. yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Ternate senilai Rp30.034.620.400,00 tetapi belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Adapun Objek Tanah dan Bangunan dimaksud diuraikan pada tabel Berikut :

No	Uraian Pemanfaatan	Luas (M2)	Letak/ Alamat	Harga Tanah (Rp)	Harga Gedung dan Bangunan (Rp)	Harga Tanah + Bangunan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Diknas	2.291,78	Jl. Maliaro		4.023.631.600,00	4.023.631.600,00
2	Diknas		Jl. Maliaro	1.561.437.500,00		1.561.437.500,00
3	Badan Lingkungan Hidup	789,00	Kalumata	252.000.000,00	1.084.582.900,00	1.336.582.900,00
4	Dinas Perhubungan	795,60	Jl. Monunutu	451.200.000,00	1.491.600.000,00	1.942.800.000,00
5	Dinas Kesehatan	1.165,60	Jl. Akehuda	1.357.950.000,00	4.125.000.000,00	5.482.950.000,00
6	PD Gama Karya Kota Ternate	722,20	Dufa-Dufa	263.995.800,00		263.995.800,00
No	Uraian Pemanfaatan	Luas (M2)	Letak/ Alamat	Harga Tanah (Rp)	Harga Gedung dan Bangunan (Rp)	Harga Tanah + Bangunan (Rp)

1	2	3	4	5	6	7
7	Badan Kependudukan.Capil dan KB	1.625,00	Dufa-Dufa	450.000.000,00	712.000.000,00	1.162.000.000,00
8	Dinas Nakersos	575,75	Tanah Mesjid	921.800.000,00	1.518.000.000,00	2.439.800.000,00
9	Dinas PU Kota Ternate	1.369,50	Jl.Siswa	135.000.000,00	3.258.000.000,00	3.393.000.000,00
10	Inspektorat Kota Ternate	1.462,00	Jati Perumnas	522.060.000,00	24.530.000,00	546.590.000,00
11	Rumah Potong Hewan Kota Tte	2.490,00	Tafure	123.201.500,00	148.767.000,00	271.968.500,00
12	Dinas Pertanian Kota Ternate	1.190,25	Sasa	1.026.100.600,00	363.528.000,00	1.389.628.600,00
13	Dinas Pertanian Kota Ternate	832,00	Batu Anteru	829.390.000,00	427.140.000,00	1.256.530.000,00
14	BP4K	1.050,00	Kel. Ngidi	615.500.000,00	249.509.000,00	865.009.000,00
15	BP4K	750,00	Kel. Jati Perumnas	122.400.000,00	168.581.000,00	290.981.000,00
16	SKB Kota Ternate	4.125,00	Dufa-Dufa	2.916.000.000,00	891.715.500,00	3.807.715.500,00
				<b>11.548.035.400,00</b>	<b>18.486.585.000,00</b>	<b>30.034.620.400,00</b>

2. Sampai dengan 31 Desember 2014 Pemerintah Kota Ternate memiliki 578 lokasi bidang tanah, yang belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Ternate sebanyak 496 bidang/lokasi dan 82 bidang/lokasi telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Ternate, daftar tanah tersebut terdapat pada *lampiran 4*.
3. Realisasi belanja modal selama tahun 2014 terdiri dari realisasi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya sebesar Rp149.178.430.887,24 sedangkan penambahan aset tetap dari belanja modal tahun 2014 yang diakui sebesar Rp138.706.203.931,99 sehingga terjadi perbedaan realisasi Belanja Modal dan pengakuan aset sebesar Rp10.472.226.955,25 karena :
  - a. Terdapat realisasi belanja barang dan jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp30.000.000,00 para Sekretariat Daerah.
  - b. Terdapat pencatatan ganda antara Dinas PU dan Dinas Pasar sebesar Rp119.275.000,00.
  - c. Terdapat koreksi aset sebesar Rp3.479.336.070,00 yaitu pengadaan barang dengan nilai perunit lebih kecil dari Rp1.000.000,00 tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Ternate yang mengharuskan setiap nilai perunit yang dapat dikapitalisasi harus lebih besar dari Rp1.000.000,00.
  - d. Terdapat koreksi aset (tercatat sebagai belanja modal, yang seharusnya adalah belanja barang) sebesar Rp124.154.250,00 yang terdapat pada : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp14.975.000,00, Dinas Pendapatan sebesar Rp49.830.000,00, Dinas Koperasi sebesar Rp24.989.250,00 dan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebesar Rp15.000.000,00 serta sebesar Rp19.360.000,00 pada Kantor Pemberdayaan Perempuan.
  - e. Terdapat Belanja Modal yang direncanakan untuk dihibahkan dan telah diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp6.779.461.633,00 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel : Realisasi Belanja Modal yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

No	Nama SKPD	Nilai Hibah
1.	Dinas Pendidikan Nasional	Rp 6.691.693.853,00
2.	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 57.800.000,00
3.	Dinas Pariwisata	Rp 29.967.780,00
	Jumlah	Rp 6.779.461.633,00

4. Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Ternate menerima hibah dari Pemerintah Pusat berupa alat angkutan darat bermotor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp417.120.000,00 selain itu pada tahun 2012 menerima hibah bantuan peralatan penanggulan bencana sebesar Rp360.029.000,00 namun baru dicatat pada tahun 2014. Kemudian pada Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp238.525.750,00 berupa komputer PC dengan rincian aset sebagaimana tabel dibawah :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	
	Mobil Truck	417.120.000,00
	Motor Trailer	49.169.000,00
	Rig	6.572.500,00
	HT	3.960.000,00
	Water Tretment	49.527.500,00
	Search Light	26.125.000,00
	Tenda Posko	41.580.000,00
	Tenda Pleton	47.850.000,00
	Tenda Regu	44.220.000,00
	Tenda Keluarga	51.150.000,00
	Velbed	6.325.000,00
	Genset	14.575.000,00
	SSB	18.975.000,00
	HF / SSB	
	Automatic Antena Tuner AT	
	DC power Suplay	
	Coacial Cable	
	Cable Tuner	
	<b>Dinas Pendidikan Nasional</b>	
2.	Komputer PC	238.525.750,00
	Jumlah	1.015.674.750,00

5. Terdapat realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp30.000.000,00 yang merupakan bagian dari upaya memperoleh aset tetap, sehingga harus dikapitalisasi kedalam nilai aset tetap, yaitu pada Sekretariat Daerah berupa biaya perencanaan pembangunan gedung Dinas Kesehatan dan Dinas Pasar.Total penambahan aset pada tahun 2014 adalah sebesar Rp138.849.838.932,00.

6. Aset renovasi pada aset tetap lainnya sebesar Rp1.557.825.000,00 adalah biaya pemeliharaan/renovasi yang diperuntukkan untuk bangunan bekas Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang sampai saat ini status kepemilikannya masih diklaim oleh 3 (tiga) pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
7. Terdapat koreksi tambah dan kurang yang berasal dari adanya (1) perpindahan penggunaan aset tetap antar SKPD, (2) koreksi pencatatan, dan (3) perpindahan karena reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan kepada gedung dan bangunan dan jalan, irigasi dan jaringan (sebagaimana telah dijelaskan di atas pada setiap kelompok aset tetap).

#### **5.5.4 Aset Lainnya**

Pos Aset Lainnya sampai dengan Tanggal 31 Desember 2014 terdiri dari :

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2014</b>	<b>31 Desember 2013</b>
- Tuntutan Ganti Rugi	664.601.671,00	941.037.426,00
- Kemitraan Dgn Pihak Ketiga	29.874.546.000,00	3.350.000.000,00
- Aset tidak berwujud	1.048.037.680,00	0
- Aset Lain-lain	37.080.444.713,65	19.326.280.482,00
<b>Jumlah</b>	<b>68.667.630.064,65</b>	<b>23.617.317.908,00</b>

Dalam tahun 2014 upaya Tim TP/TGR untuk menyelesaikan kerugian daerah atas temuan aparat pemeriksa dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Mendorong penyelesaian kasus kerugian melalui penandatanganan SKTJM untuk 3 kasus dengan nilai Rp97.052.104,00 (sebagaimana terdapat dalam daftar dibawah ini pada no.6,7 dan 8)
2. Menyelesaikan pengembalian kepada daerah atas dua SKTJM masing-masing sebesar Rp354.172.868,00 dan Rp19.314.991 atau sebesar Rp 373.487.859,00 yaitu kelebihan penyetoran pajak oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tahun 2009 s/d 2011 (sebagaimana terdapat pada daftar dibawah ini pada nomor 5).

Dengan demikian posisi kerugian daerah yang telah diterbitkan SKTJM yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp664.601.671,00 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam daftar dibawah ini :

<b>No</b>	<b>Uraian Tuntutan Perbendaharaan</b>	<b>2014 (Rp)</b>	<b>2013 (Rp)</b>
1	Kas yang dicuri TA 2011 di SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	105.581.293,00	105.581.293,00
2	Kas yang dicuri pada TA 2011 di SKPD Kecamatan Ternate Selatan	64.260.008,00	64.260.008,00
3	Penggunaan uang belanja untuk kepentingan pribadi di SKPD Kecamatan Ternate Tengah	154.050.000,00	154.050.000,00

4	Penggunaan uang belanja TA 2011 untuk kepentingan pribadi an. Mantan Bendahara SKPD Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi	243.658.266,00	243.658.266,00
5.	Kelebihan Penyetoran ke Kas Negara dikarenakan penyetoran pajak atas PPN dan PPh pajak rekanan TA 2009 – TA 2011 yang dibayar dua kali (ganda). Sudah disertai dengan SKTJM an MTS (BUD TA 2009 - 2011) dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 377	0	373.487.859,00
6	Penggunaan uang belanja TA.2012 untuk kepentingan pribadi an. Mantan bendahara Kantor KB	59.135.642,00	
7	Kehilangan kas pada Kecamatan Hiri Tahun 2012	18.926.462,00	
8	TGR atas tindak lanjut temuan perjalanan Dinas oleh BPK thn 2011 & 2012 ( yg sudah ada SKTJM)	18.990.000,00	
	Jumlah	664.601.671,00	941.037.426,00

Sesuai tabel tersebut diatas tindak lanjut temuan BPK atas perjalanan dinas terdapat pada *lampiran 5*.

1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Ternate yang diperuntukkan bagi pembangunan *Waterboom* kerjasama dengan PT. Indoteranusa, pengakuan aset milik Pemerintah Kota Ternate dengan pihak ketiga ini mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Ternate dan pihak terkait, sebagaimana tampak dalam tabel berikut :

No.	Aktiva Bangun Guna Serah	AKTIVA YANG DIAKUI (Rp)		KETERANGAN
		Bangunan	Tanah Rp	
1.	<u>Bangunan Waterboom</u>		3.350.000.000	- Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate - Bangunan dibangun melalui kerjasama dengan PT. Indoteranusa dengan masa Pengembalian 30 tahun

No.	Aktiva Bangun Guna Serah	AKTIVA YANG DIAKUI (Rp)		KETERANGAN
		Bangunan	Tanah Rp	
2	<u>Mall JatiLand</u>		26.524.546.000	- Tanah Milik Pemerintah Kota Ternate yang telah memiliki Sertifikat status Hak Pengelolaan No. 01 tanggal 25

				<p>Oktober tahun 2004 seluas 38.457 M2 dan diatas tanah tersebut terdapat sertifikat HGB atas Nama PT. Jati Luhur Gemilang No. 26 tanggal 24 Nopember 2004 seluas 33.073 M2</p> <p>- Bangunan dibangun melalui kerjasama dengan PT. Jatiluhur Gemilang dengan masa Pengembalian 25 tahun</p>
--	--	--	--	--

## 2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Tahun 2014 sebelum pemeriksaan sebesar Rp35.621.500.713,00 terdiri dari aset dalam kondisi rusak berat, sedang dalam proses usulan penghapusan, hilang, ditambah reklasifikasi dari aset tetap lainnya berupa aset tidak berwujud sebesar Rp1.048.037.680,00 rincian dapat dilihat pada *Lampiran 6*.

## 5.6 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Pemerintah Kota Ternate sampai 31 Desember 2014, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
- Utang Perhitungan pihak ketiga	454.863,00	Rp 18.147.844.429,00

Kewajiban Pemerintah Kota Ternate seluruhnya terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek. Pos Kewajiban Jangka Pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Ternate yang diharapkan akan dibayar kembali jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Untuk TA 2014 seluruhnya berupa utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa potongan pajak pemerintah pusat yang belum disetorkan ke kas negara oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp454.545,00 dan tagihan pelaksanaan pemotongan pajak pada BUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum dibayarkan sebesar Rp318,00. Rincian daftar mutasi PFK sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal	Terima	Setor	Sisa
Utang Askes	464.500.589,00	6.558.487.594,00	7.022.988.183,00	-
Utang PPh 21	4.667.970.703,00	12.307.266.998,00	16.975.237.701,00	-
Utang PPh 22	506.260.513,00	1.352.680.861,00	1.858.941.374,00	-
Uraian	Saldo Awal	Terima	Setor	Sisa
Utang PPh 23	1.413.987.205,00	1.089.732.843,00	2.503.720.048,00	-
Utang PPh 4 (2)	-	2.197.594.932,00	2.197.594.932,00	-
Utang PPN Pusat	8.751.019.613,00	16.101.796.810,00	24.852.361.560,00	454.863,00
Utang Taperum	42.617.000,00	497.299.000,00	539.916.000,00	-

Utang IWP	2.301.488.806,00	21.832.094.161,00	24.133.582.967,00	-
Jumlah	18.147.844.429,00	61.936.953.199,00	80.084.342.765,00	454.863,00

## 5.7. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Ternate. Pos Ekuitas Dana terdiri dari :

No	Uraian	31 Des 2014 (Rp)	31 Des 2013 (Rp)
1	Ekuitas Dana Lancar	34.338.767.954,70	(7.977.883.116,00)
2	Ekuitas Dana Investasi	1.880.328.961.471,28	1.441.614.606.245,00
3	Ekuitas Dana Cadangan	-	-
	Jumlah	1.914.667.729.425,98	1.433.636.723.129,00

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 terdiri dari :

No	Uraian	Per 31 Des 2014(Rp)	Per 31 Des 2013(Rp)
1	SiLPA	18.401.465.805,70	(17.822.064.283,00)
2	Cadangan Piutang	12.164.807.773,00	6.180.994.001,00
3	Cadangan Persediaan	3.748.182.876,00	3.653.787.166,00
4	Pendapatan yang Ditangguhkan	24.311.500,00	9.400.000,00
	Jumlah	34.338.767.954,70	(7.977.883.116,00)

Saldo ekuitas dana investasi terdiri dari :

No	Uraian	Per 31 Desember 2014 (Rp)	Per 31 Desember 2013 (Rp)
1	Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang	51.339.750.575,39	37.212.066.015,00
2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.760.321.580.831,24	1.380.785.222.322,00
3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	68.667.630.064,65	23.617.317.908,00
	Jumlah	1.880.328.961.471,28	1.441.614.606.245,00

## 5.8. KOMPONEN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di Kas Daerah selama TA 2014. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

### 5.8.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Ternate dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp190.119.307.729,94 untuk TA 2014, aktivitas operasi terutama terdiri dari :

#### 5.8.1.1. Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari Pendapatan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi 2014 (Rp)
1	Pajak Hotel-	2.485.877,645,00
2	Pajak Restoran	5.043.419.820,00
3	Pajak Hiburan	628.290.555,00
4	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.394.439.560,00
5	Pajak Penerangan Jalan PLN	12.512.225.569,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	2.932.744.970,00
7	Pajak Parkir	125.521.722,00
8	Pajak Air Bawah tanah	506.100.502,00
9	BPHTB	3.004.749.800,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	2.527.233.422,00
<b>J U M L A H</b>		<b>31.160.603.565,00</b>

#### 5.8.1.2. Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah

Arus masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi 2014 (Rp)
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>9.068.335.250,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.580.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.643.165.000,00
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	9.400.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.263.700.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	5.444.565.250,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	75.945.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	620.980.000,00
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.345.810.000,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	399.865.000,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	-
3	Retribusi Terminal	315.600.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	359.500.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Hapus)	20.100.000,00
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2014 (Rp)</b>
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.635.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	150.110.000,00
<b>III</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>4.375.341.891,00</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.055.522.616,00
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	649.277.800,00
3	Retribusi Izin Trayek	18.045.000,00

4	Retribusi Izin Usaha Perikanan	169.540.200,00
5	Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP/TDP)	326.756.275,00
6	Retribusi Izin Usah Rekreasi dan Olah Raga	152.700.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	-
8	Sumbangan Pihak Ketiga ( Kontraktor )	3.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.789.487.141,00</b>

#### 5.8.1.3. Arus Kas Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Pendapatan Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan adalah pendapatan deviden dari Bank BPD Maluku sebesar Rp765.132.728,00.

#### 5.8.1.4. Arus Masuk Kas dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus masuk kas dari Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi 2014 (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	427.182.683,59
2	Bunga Deposito	1.961.579.452,57
3	Sumbangan Pihak Ketiga	70.502.500,00
4	Penerimaan <sup>2</sup> PAD yang sah	2.175.778.567,47
5	Akta Pendirian Koperasi	61,686,00
6	Jasa Askes	1.039.914.213,00
7	Donasi Bandara	795.615.000,00
8	Sumbangan Pihak Ke Tiga ( Kontraktor)	2.133.184.987,81
<b>Jumlah</b>		<b>8.665.443.403,44</b>

#### 5.8.1.5. Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

Arus masuk Kas dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari :

- a. Arus masuk kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan selama tahun Pelaporan terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi 2014 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	16.103.566.403,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	6.779.380.299,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.882.946.702,00</b>

- b. Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus masuk kas dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi 2014 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	339.118.945,00
2	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	386.974.512,00
3	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.883.193.516,00

4	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	383.182.410,00
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	11.883.998.532,00
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	455.191.154,00
7	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	21.883.355,00
	Jumlah	15.353.542.424,00

#### 5.8.1.6. Arus Kas Masuk dari Dana Alokasi Umum

Arus masuk kas dari Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp536.443.879.000.

#### 5.8.1.7. Arus Kas Masuk dari Dana Alokasi Khusus

Arus masuk kas dari Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp59.724.230.000.

No	Uraian	Realisasi 2014 (Rp)
1	Dak Bidang Pendidikan	19.304.170.000,00
2	DAK Bidang Kesehatan	5.260.160.000,00
3	DAK Bidang Infrastruktur jalan	9.791.070.000,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	492.520.500,00
5	DAK Bidang Infrastruktur air minum dan sanitasi	2.001.289.500,00
6	DAK Bidang prasarana pemerintahan	7.685.330.000,00
7	DAK Bidang kelautan dan perikanan	4.586.970.000,00
8	DAK Bidang pertanian	3.824.640.000,00
9	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1.809.940.000,00
10	DAK Bidang Keluarga berencana	1.087.840.000,00
11	DAK Bidang perdagangan	3.343.300.000,00
12	DAK Bidang perhubungan	537.000.000,00
	Jumlah	59.724.230.000,00

#### 5.8.1.8. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

Arus masuk kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan, yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PKB	4.122.418.616,00
2	BBNKB	7.954.337.071,00
3	PBBKB	4.249.324.473,00
4	Pajak Air Permukaan	105.256.752,00
5	Pelampauan Target DBH TA 2013	
6	Sisa DBH TA 2013 yang belum didistribusikan	
	<b>Jumlah</b>	16.431.336.912,00

#### **5.8.1.9. Arus Kas Masuk dari Dana Penyesuaian**

Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi 2014 (Rp)
1	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah	63.424.586.000,00
2	Dana Otonomi Khusus	885.328.000,00
	Jumlah	64.309.914.000,00

#### **5.8.1.10. Arus Kas Masuk dan Penerimaan lain-lain**

Arus masuk kad dari penerimaan lain-lain merupakan penerimaan yang berasal dari pengembalian dana taspen tahun 2014 yaitu sebesar Rp51.050.100,00.

#### **5.8.1.11. Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama TA 2014 sebesar Rp426.364.834.850,00. Pengeluaran kas pada belanja diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan kepala pimpinan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honor panitia pelaksanaan anggaran kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

#### **5.8.1.12. Arus Keluar Kas untuk Belanja Hibah**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2014 sebesar Rp5.300.000.000,00

#### **5.8.1.13. Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Sosial**

Arus keluar kas dari Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Belanja Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2014 sebesar Rp4.799.967.700,00.

#### **5.8.1.14. Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Keuangan**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2014 sebesar Rp498.370.270,00. Pengeluaran arus kas ini diperuntukan bagi pemberian bantuan untuk partai politik.

#### **5.8.1.15. Arus Keluar Kas untuk Belanja Tidak Terduga**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Belanja Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2014 sebesar Rp9.686.580.000,00.

#### **5.8.1.16. Arus Keluar Kas Untuk Belanja Barang dan jasa**

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama TA 2014 sebesar Rp133.808.505.425,00. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk (termasuk benih unggul), penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Ternate.

### 5.8.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota Ternate kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp148.610.746.787,24) yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Ternate pada TA 2014 lebih menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Rincian arus kas ini terdiri dari :

#### 5.8.2.1 Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Arus masuk kas dari aktivitas investasi non keuangan berasal dari penjualan aset tetap yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penjualan Kendaraan Dinas Roda dua	6.781.500,00
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	560.902.600,00
	Total	567.684.100,00

#### 5.8.2.2. Arus Keluar Kas untuk Belanja modal

Arus kas keluar dari belanja modal merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja modal yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	11.608.587.950,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	943.700.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4.106.097.312,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Atas Air Bermotor	89.476.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Atas Air tidak Bermotor	40.950.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	409.349.350,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	298.006.350,00
8	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.161.596.506,00
9	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	800.444.957,00
10	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.375.967.250,00
11	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.355.999.682,00
12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	57.912.780,00
13	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	31.257.079,00
14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	553.127.125,00
15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	79.698.850,00
16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur	100.949.050,00
17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.397.603.000,00
18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	6.163.136.650,00
19	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	40.877.739.600,00
20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	4.033.964.000,00
21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	10.990.954.761,48
22	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	6.105.920.800,00
23	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.026.402.080,00
24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	51.118.080.529,76
25	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.290.369.225,00
26	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Praktek	161.140.000,00
	Jumlah	149.178.430.887,24

#### 5.8.3. Arus Kas dan Aktivitas Pembiayaan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan suRplus anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk TA 2014 adalah sebesar Rp5.750.000.000,00.

#### 5.8.4. Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi APBD Kota Ternate. Arus kas bersih

dari aktivitas ini untuk TA tahun 2014 adalah (Rp17.961.839.294,00). Rincian arus kas ini terdiri dari :

**5.8.4.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, nilai penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp52.919.381.475,00 yang sebagian besar berasal dari pungutan Taperum, IWP dan Askes yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

**5.8.4.2. Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan Pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, nilai penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebesar Rp70.881.220.769,00 yang sebagian besar berasal dari pungutan Taperum, IWP dan Askes yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

## **BAB VI PENUTUP**

Pemerintah Kota Ternate memiliki 42 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasi dari 42 SKPD entitas akuntansi tersebut kemudian disampaikan kepada WaliKota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate.

Pemerintah Kota Ternate dalam Tahun 2014 juga telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013, berupa perbaikan dalam pelaporan pendapatan, pelaporan pengelolaan aset, pelaporan nilai investasi, penatausahaan perhitungan PFK, dan beberapa rekomendasi lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate TA 2014 diharapkan mampu memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan manajemen, baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kota Ternate.

Demikian Laporan Keuangan Kota Ternate TA 2014.